

PENERAPAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI DAERAH, TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DALAM PRAKTEK LAPANGAN

Hasil Survei Pertambangan Kabupaten Dan Provinsi
Di Indonesia Tahun 2015

Oleh:



INDONESIAN MINING INSTITUTE

Bekerja Sama dengan:



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

Dipresentasikan Pada Acara:

SOSIALISASI DAN SEMINAR EITI
Meningkatkan Partisipasi Pemangku
Kepentingan Dalam Transparansi Pengelolaan
Industri Ekstraktif Di Indonesia

**HOTEL GRAND INNA KUTA BALI
25 AGUSTUS 2016
BALI**

SURVEI PERTAMBANGAN

Dalam pemeberian izin usaha pertambangan, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pemberian izin usaha dengan ketentuan-ketentuan wilayah tertentu (UU No. 4 Tahun 2009). Dalam hal ini pemerintah daerah yang dimaksud adalah Gubernur dan Walikota/Bupati tergantung pada lokasi tambang berada.

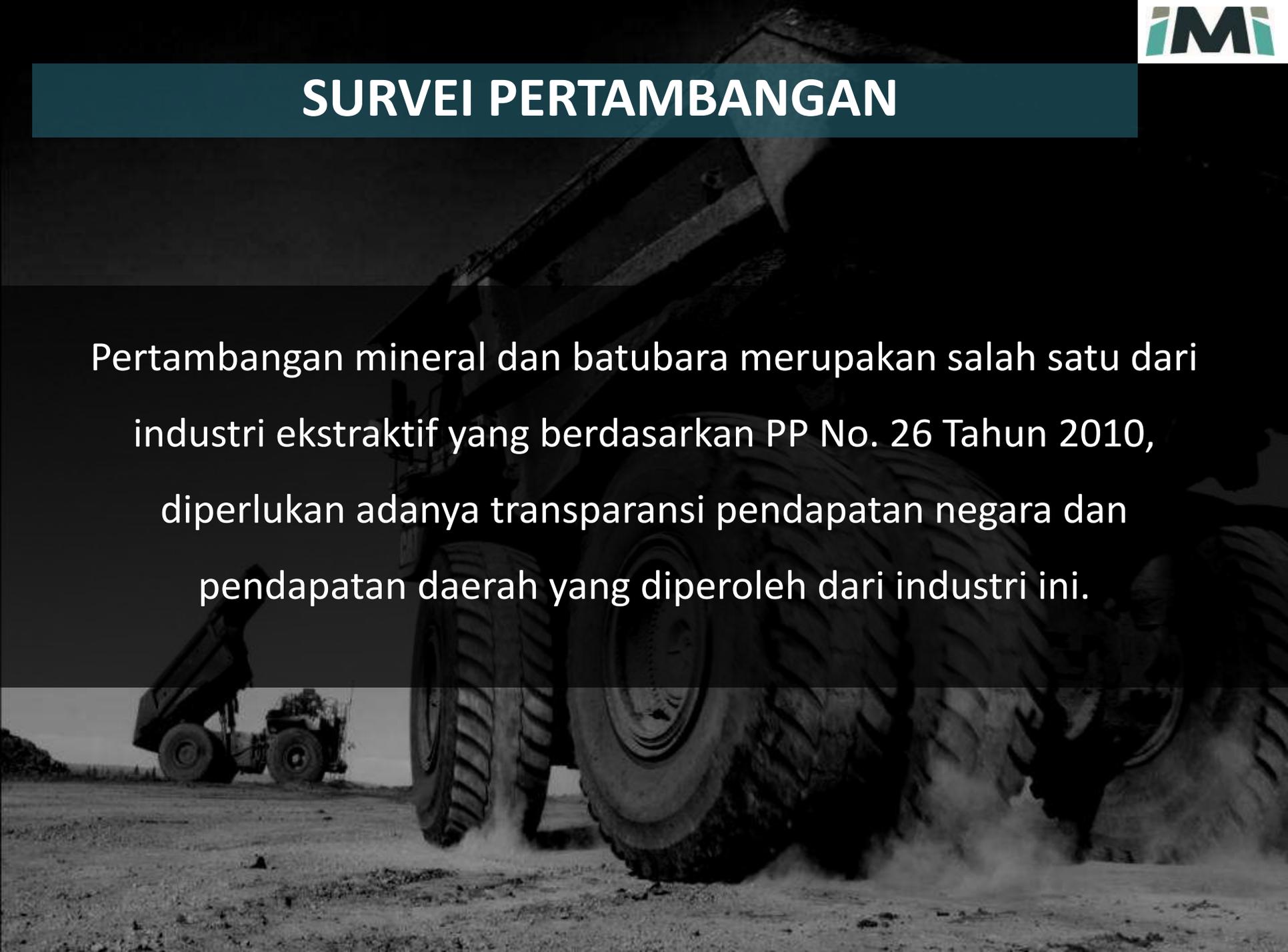
SURVEI PERTAMBANGAN

Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing (gubernur) dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat.

Masing-masing daerah memiliki kebijakannya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.

SURVEI PERTAMBANGAN

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dari industri ekstraktif yang berdasarkan PP No. 26 Tahun 2010, diperlukan adanya transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ini.

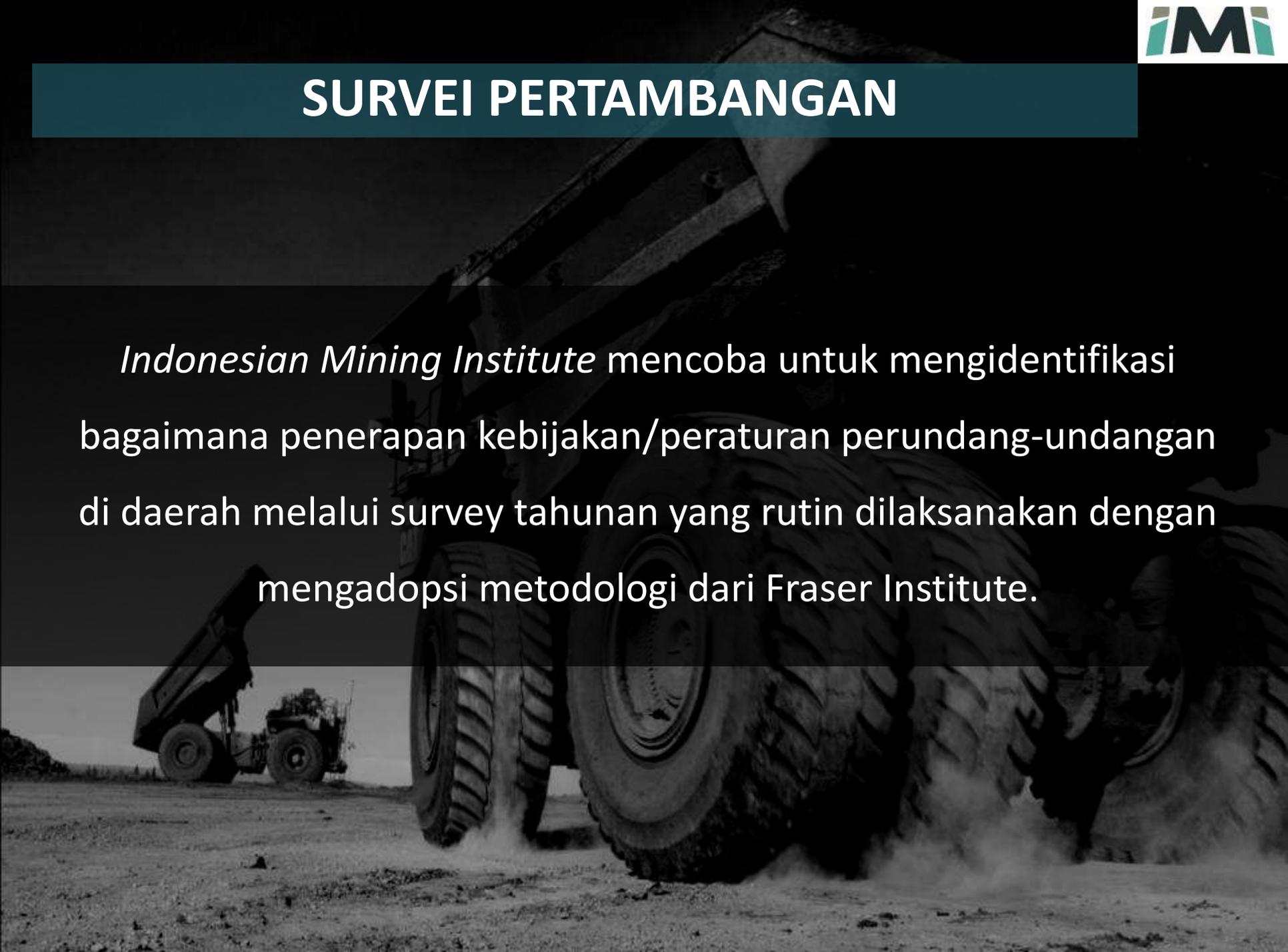


SURVEI PERTAMBANGAN

Dengan adanya kebijakan daerah dan kebijakan pusat terkadang menimbulkan adanya dualisme peraturan yang berlaku. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu melakukan sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat serta transparansi urusan pemerintahan agar penerapan masing-masing kebijakan dapat berjalan baik.

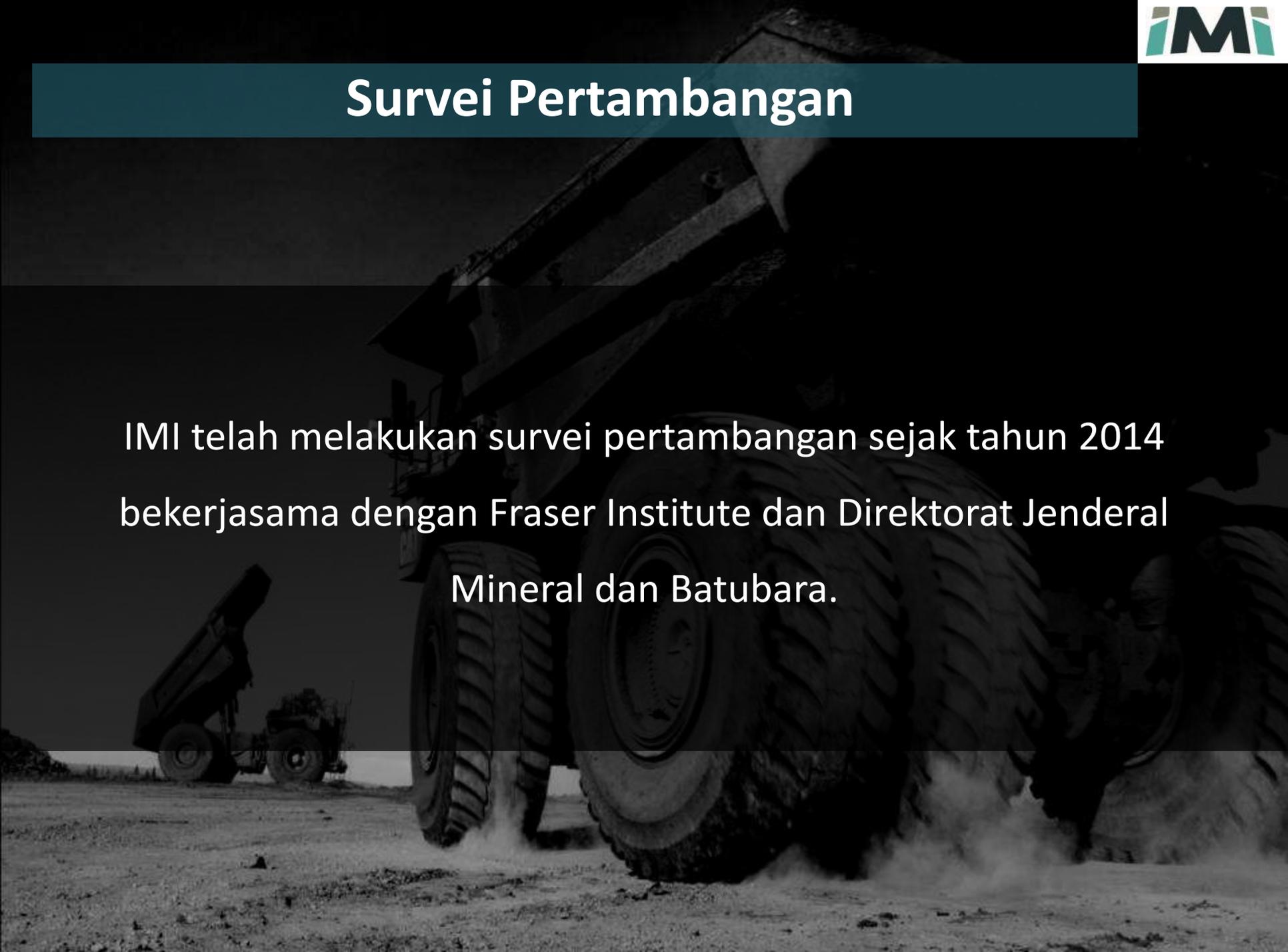
SURVEI PERTAMBANGAN

Indonesian Mining Institute mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan di daerah melalui survey tahunan yang rutin dilaksanakan dengan mengadopsi metodologi dari Fraser Institute.



Survei Pertambangan

IMI telah melakukan survei pertambangan sejak tahun 2014 bekerjasama dengan Fraser Institute dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.



TUJUAN SURVEI

Survei ini bertujuan untuk membuat kajian (*report card*) yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan dalam rangka menarik investasi disektor pertambangan demi pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik

1.

Informasi Umum
Survei

2.

Metodologi
Survei

3.

Hasil Survei

4.

Perbandingan
dengan Hasil Tahun
Sebelumnya

1. INFORMASI UMUM SURVEI



1. INFORMASI UMUM SURVEI



Merupakan suatu survei untuk mengukur persepsi pelaku pertambangan terhadap kebijakan pertambangan mineralba di daerah-daerah utama penghasil sumber daya mineralba

720
Responden

72
Perusahaan

25
Kabupaten

17
Provinsi

Waktu pelaksanaan survei:



1. INFORMASI UMUM SURVEI



Kusioner yang
dibagikan

25 Kabupaten
17 Provinsi
720 Kuesioner



Kusioner yang
diterima kembali

20 Kabupaten
14 Provinsi
339 Kuesioner

25 kabupaten dipilih dari sekitar lebih 80 kabupaten yang menerima **dana bagi hasil** lebih dari 20 miliar rupiah di tahun 2014 (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 84/PMK.07/2014)

Survei ini merupakan penilaian atas persepsi dari pelaku industri pertambangan. Hasil survei sangat bergantung dari pengetahuan, pengalaman, dan penilaian dari masing-masing individu responden.

Pemilihan kabupaten yang dijadikan obyek survei bukan semata-mata mengambil 20 kabupaten dengan dana bagi hasil teratas, tetapi pemilihan kabupaten tersebut juga didasarkan atas pertimbangan pemerataan sesuai dengan provinsi di Indonesia.

Peringkat dalam hasil survei ini bukanlah merupakan peringkat yang mutlak karena masih ada kabupaten lain yang belum diikuti dalam survei tahun ini.

Nilai pada provinsi merupakan akumulasi dari hasil kuesioner pada tingkat kabupaten yang mewakili

A large yellow mining truck is shown in a mining environment, dumping a load of dark, rocky material. The truck's body is yellow, and its tires are large and black. The background shows a clear blue sky and some industrial structures. The text '2. METODOLOGI SURVEI' is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

2. METODOLOGI SURVEI

2. METODOLOGI SURVEI



Survei Pertambangan Kabupaten dan Provinsi merupakan program rutin tahunan IMI yang diadopsi dari survei serupa yang diadakan oleh Fraser Institute untuk negara dan dimodifikasi oleh IMI untuk kabupaten dan provinsi. Survei dibagi menjadi 3 Bagian, yaitu:

Bagian 1

- 17 pertanyaan untuk memperoleh persepsi profesional pertambangan mengenai keadaan kebijakan suatu kabupaten dalam mendukung kegiatan pertambangan

Bagian 2

- Survei mengenai pola investasi perusahaan pertambangan di Indonesia

Bagian 3

- Komentar umum responden tentang keadaan penerapan kebijakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertambangan

2. METODOLOGI SURVEI



Pertanyaan pada Bagian 1

No	Pertanyaan
1	Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
2	Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
3	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten
4	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
5	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
6	Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien)
7	Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan)
8	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
9	Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi
10	Ketersediaan infrastruktur

2. METODOLOGI SURVEI



Pertanyaan pada Bagian 1

No	Pertanyaan
11	Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau rumah sakit,)
12	Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)
13	Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat
14	Peraturan ketenagakerjaan
15	Keamanan lokal
16	Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
17	Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan

2. METODOLOGI SURVEI



Respon untuk Bagian 1

- 1 = Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 2 = Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 3 = Agak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 4 = Sangat menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.
- 5 = Tidak akan mengupayakan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di kabupaten.



3. HASIL SURVEI

A large-scale mining operation in a dry, reddish-brown landscape. In the foreground, a massive yellow and black haul truck is parked on a dirt road. In the background, another haul truck is visible on the left, and a large excavator is positioned on the right. The sky is clear and blue.

Terdapat 5 indeks yang menggambarkan hasil survei, yaitu:

1. Indeks Potensi Kebijakan
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*
4. Ruang untuk Peningkatan
5. Indeks Komposit



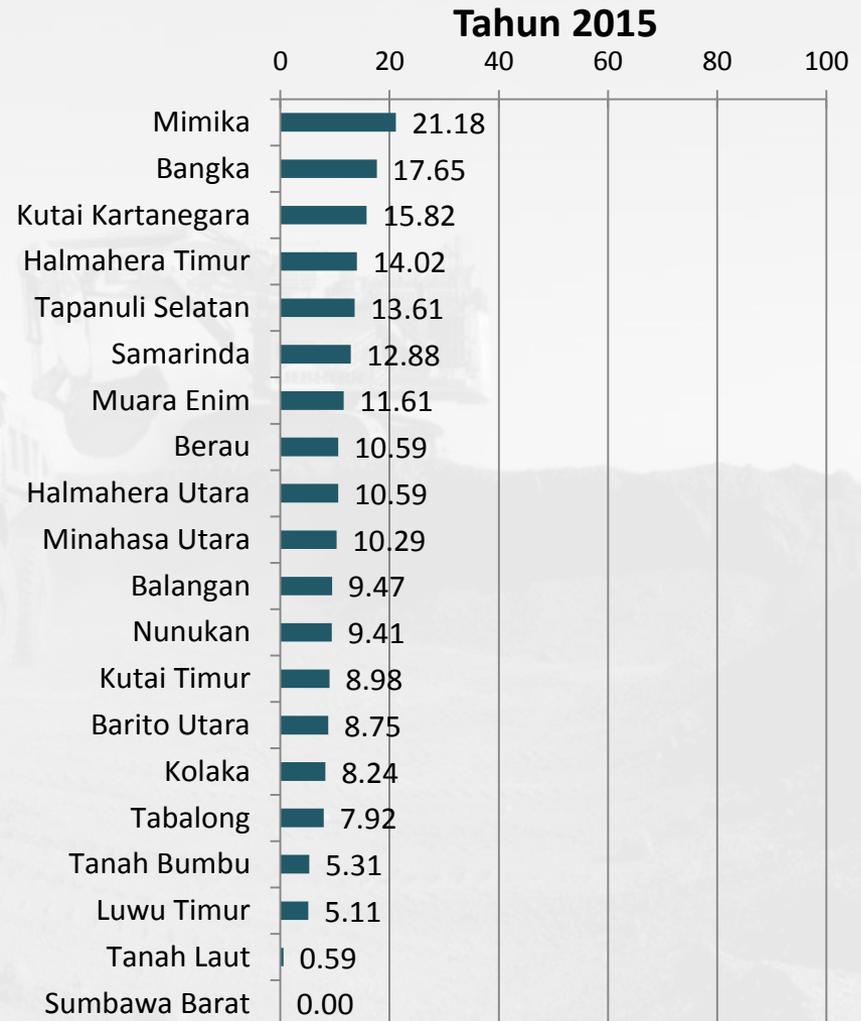
1. Indeks Potensi Kebijakan

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah. Semakin tinggi indeks ini berarti semakin baik kondisi kebijakan yang diterapkan pada daerah tersebut

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-17) dengan cara menghitung persentase responden yang menjawab pilihan 1 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut

1. Indeks Potensi Kebijakan Kabupaten

Indeks Potensi Kebijakan		
Ranking 2015	Kabupaten/Kota	Nilai 2015
1	Mimika	21,18
2	Bangka	17,65
3	Kutai Kartanegara	15,82
4	Halmahera Timur	14,02
5	Tapanuli Selatan	13,61
6	Samarinda	12,88
7	Muara Enim	11,61
8	Berau	10,59
9	Halmahera Utara	10,59
10	Minahasa Utara	10,29
11	Balangan	9,47
12	Nunukan	9,41
13	Kutai Timur	8,98
14	Barito Utara	8,75
15	Kolaka	8,24
16	Tabalong	7,92
17	Tanah Bumbu	5,31
18	Luwu Timur	5,11
19	Tanah Laut	0,59
20	Sumbawa Barat	0,00



1. Indeks Potensi Kebijakan Provinsi

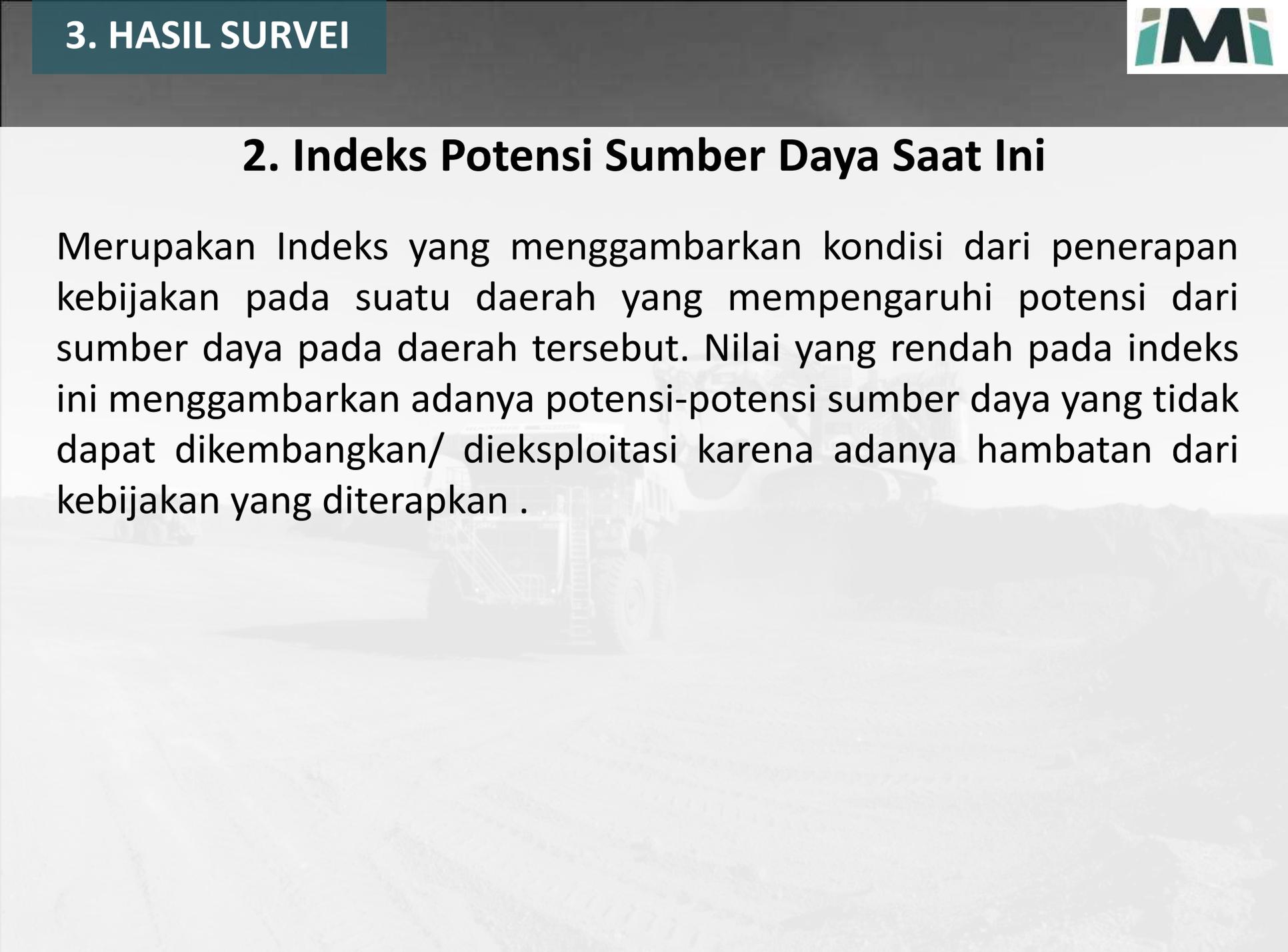
Indeks Potensi Kebijakan

Potential Policy Index		
Ranking	Provinsi	Nilai
1	Papua	21,18
2	Bangka Belitung	17,65
3	Maluku Utara	14,02
4	Sumatera Utara	13,61
5	Kalimantan Timur	12,86
6	Sumatera Selatan	11,61
7	Maluku	10,59
8	Sulawesi Utara	10,29
9	Kalimantan Utara	9,41
10	Kalimantan Tengah	8,75
11	Sulawesi Tenggara	8,24
12	Kalimantan Selatan	5,96
13	Sulawesi Selatan	5,11
14	Nusa Tenggara Barat	0,00



2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah yang mempengaruhi potensi dari sumber daya pada daerah tersebut. Nilai yang rendah pada indeks ini menggambarkan adanya potensi-potensi sumber daya yang tidak dapat dikembangkan/ dieksploitasi karena adanya hambatan dari kebijakan yang diterapkan .



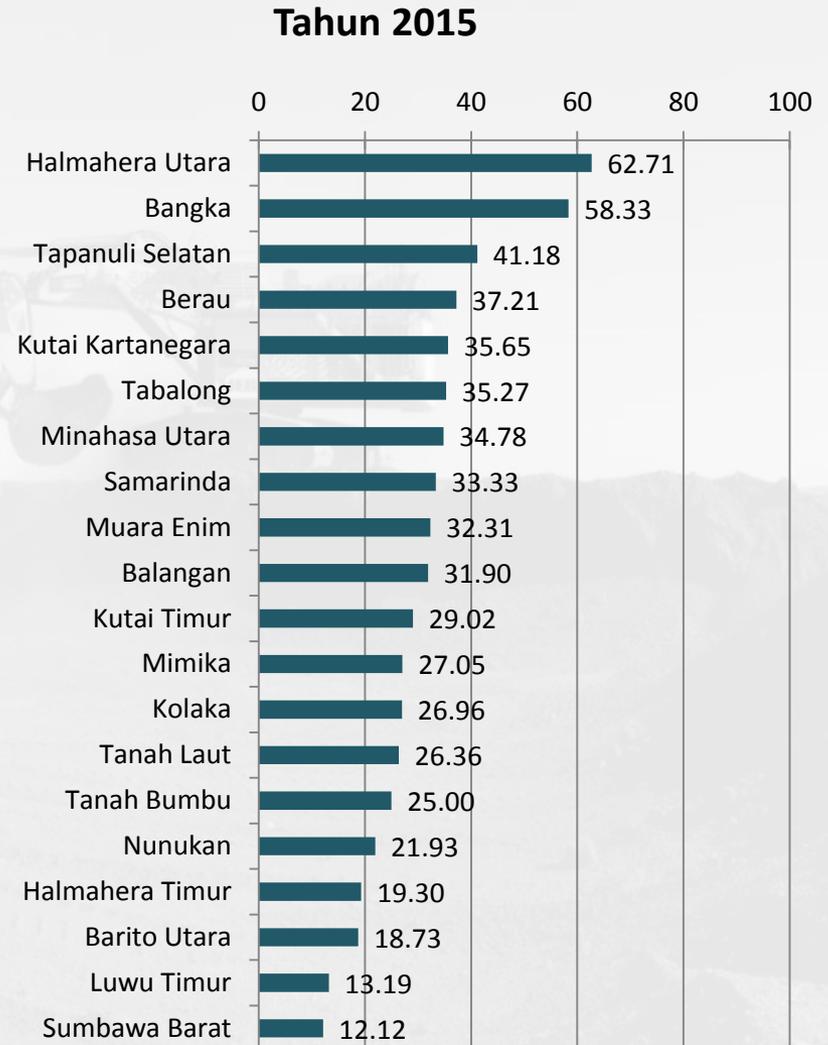
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan cara menghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeks ini dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1

2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Kabupaten

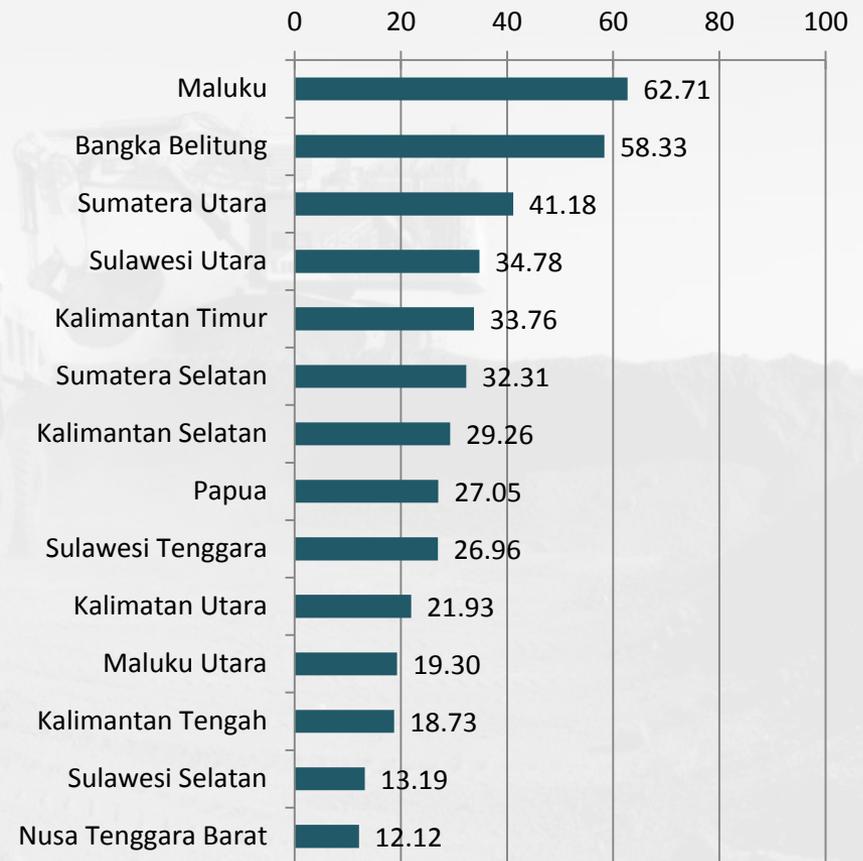
Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini		
Ranking 2015	Kabupaten/Kota	Nilai 2015
1	Halmahera Utara	62,71
2	Bangka	58,33
3	Tapanuli Selatan	41,18
4	Berau	37,21
5	Kutai Kartanegara	35,65
6	Tabalong	35,27
7	Minahasa Utara	34,78
8	Samarinda	33,33
9	Muara Enim	32,31
10	Balangan	31,90
11	Kutai Timur	29,02
12	Mimika	27,05
13	Kolaka	26,96
14	Tanah Laut	26,36
15	Tanah Bumbu	25,00
16	Nunukan	21,93
17	Halmahera Timur	19,30
18	Barito Utara	18,73
19	Luwu Timur	13,19
20	Sumbawa Barat	12,12



2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Provinsi

Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini		
Ranking	Provinsi	Nilai
1	Maluku	62,71
2	Bangka Belitung	58,33
3	Sumatera Utara	41,18
4	Sulawesi Utara	34,78
5	Kalimantan Timur	33,76
6	Sumatera Selatan	32,31
7	Kalimantan Selatan	29,26
8	Papua	27,05
9	Sulawesi Tenggara	26,96
10	Kalimantan Utara	21,93
11	Maluku Utara	19,30
12	Kalimantan Tengah	18,73
13	Sulawesi Selatan	13,19
14	Nusa Tenggara Barat	12,12



3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah yang mempengaruhi potensi dari sumber daya pada daerah tersebut apabila kebijakan suatu daerah dikelola dengan baik. **Indeks ini mengasumsikan beberapa kebijakan telah dikelola dengan baik.**

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan cara menghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeks ini dilakukan pembobotan sebagai berikut:

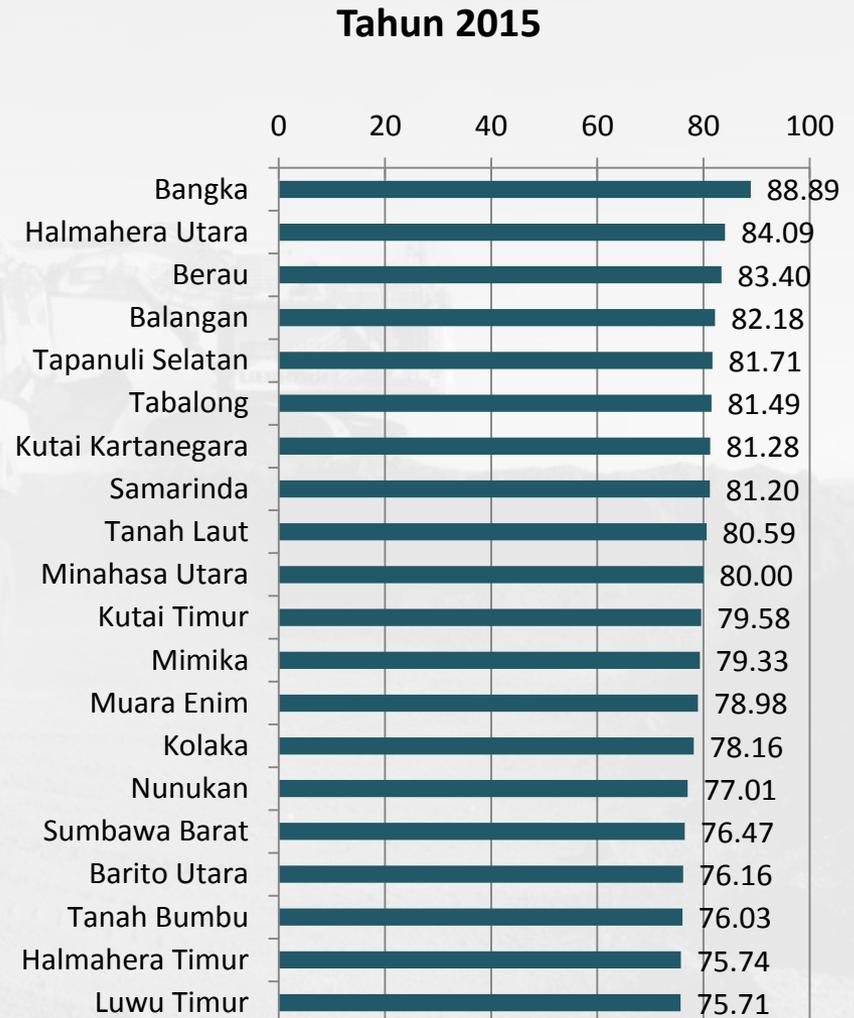
3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*

Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1

Namun untuk pertanyaan 1,2,7,8,9,13 jawaban responden akan diasumsikan menjadi pilihan 1 karena diasumsikan kebijakan di daerah tersebut telah dikelola dengan baik.

3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice* Kabupaten

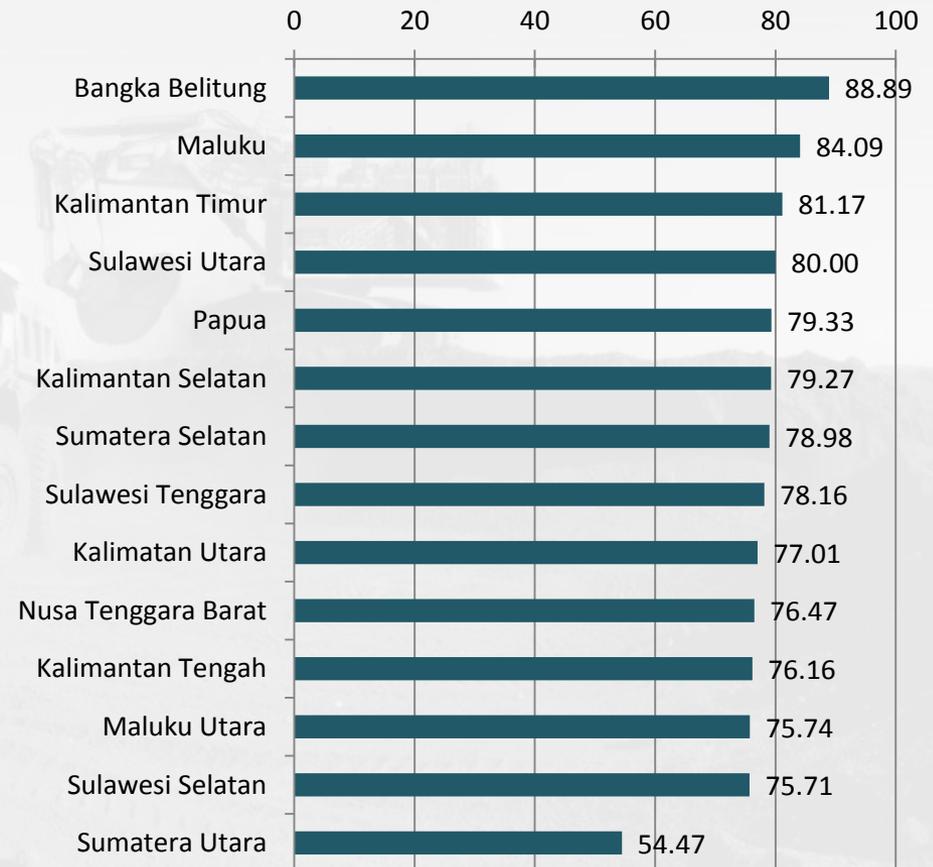
Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice		
Ranking 2015	Kabupaten/Kota	Nilai 2015
1	Bangka	88,89
2	Halmahera Utara	84,09
3	Berau	83,40
4	Balangan	82,18
5	Tapanuli Selatan	81,71
6	Tabalong	81,49
7	Kutai Kartanegara	81,28
8	Samarinda	81,20
9	Tanah Laut	80,59
10	Minahasa Utara	80,00
11	Kutai Timur	79,58
12	Mimika	79,33
13	Muara Enim	78,98
14	Kolaka	78,16
15	Nunukan	77,01
16	Sumbawa Barat	76,47
17	Barito Utara	76,16
18	Tanah Bumbu	76,03
19	Halmahera Timur	75,74
20	Luwu Timur	75,71



3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice* Provinsi

Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice*

Indeks Potensi Sumber Daya <i>Best Practice</i>		
Ranking	Provinsi	Nilai
1	Bangka Belitung	88,89
2	Maluku	84,09
3	Kalimantan Timur	81,17
4	Sulawesi Utara	80,00
5	Papua	79,33
6	Kalimantan Selatan	79,27
7	Sumatera Selatan	78,98
8	Sulawesi Tenggara	78,16
9	Kalimantan Utara	77,01
10	Nusa Tenggara Barat	76,47
11	Kalimantan Tengah	76,16
12	Maluku Utara	75,74
13	Sulawesi Selatan	75,71
14	Sumatera Utara	54,47



4. Ruang untuk Peningkatan

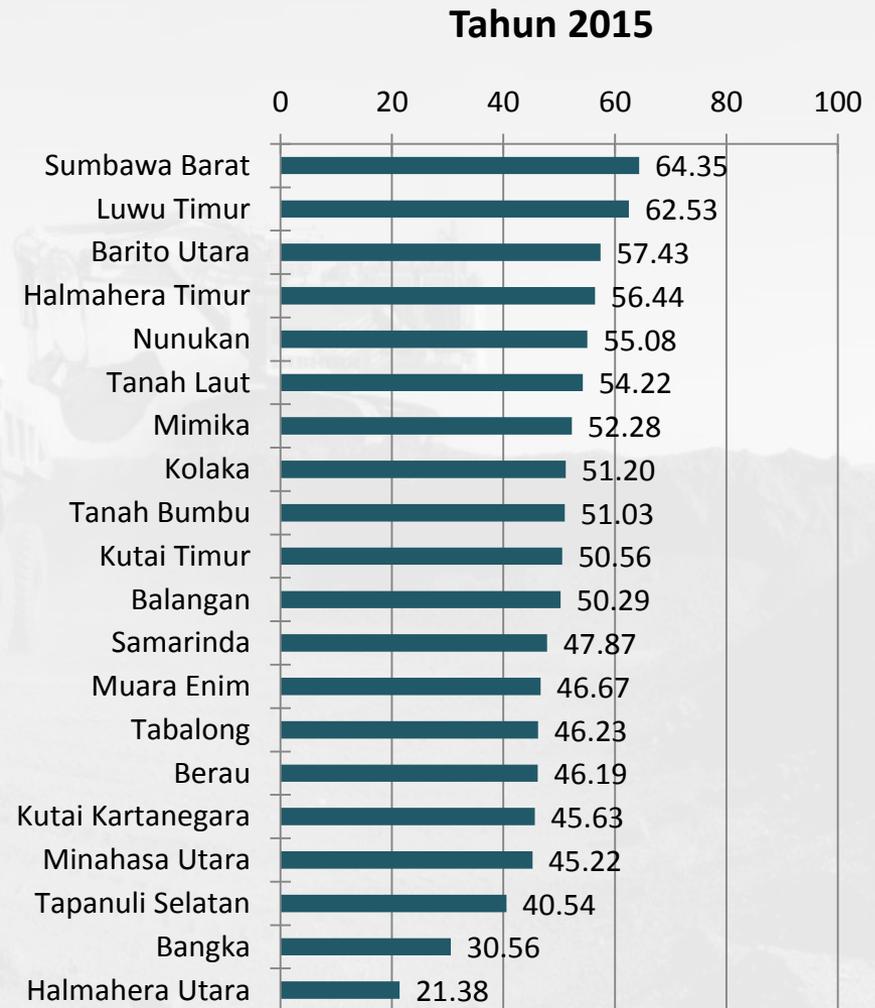
Merupakan Indeks yang menggambarkan seberapa jauh suatu daerah dapat berkembang apabila kebijakan dikelola dengan baik

Dinilai dari selisih hasil Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice* dan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini



4. Ruang untuk Peningkatan Kabupaten

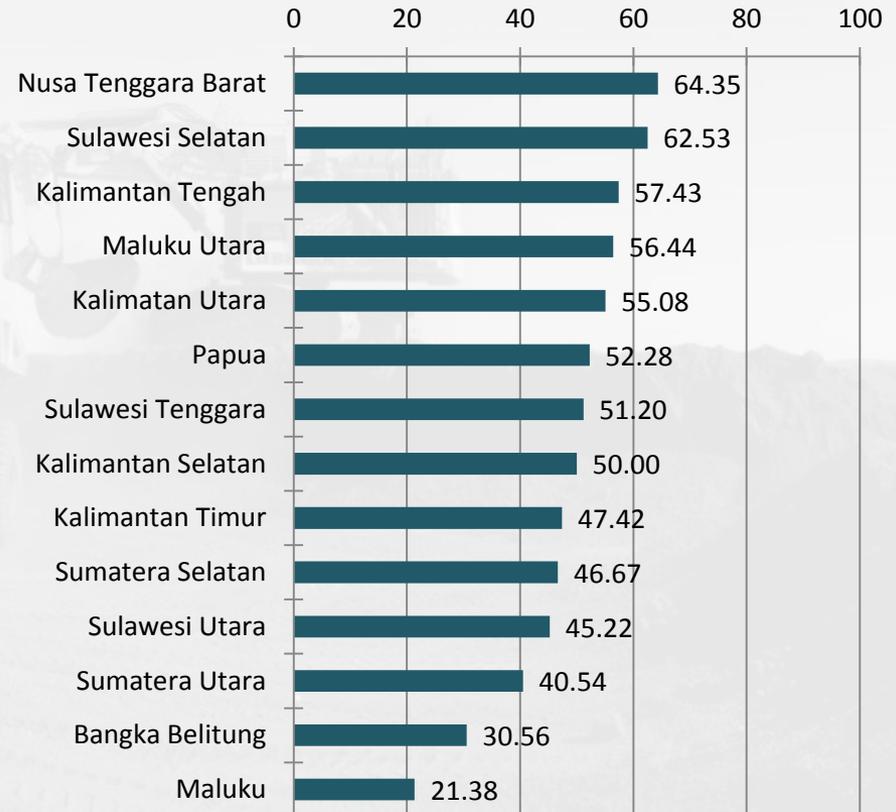
Ruang untuk Peningkatan		
Ranking 2015	Kabupaten/Kota	Nilai 2015
1	Sumbawa Barat	64,35
2	Luwu Timur	62,53
3	Barito Utara	57,43
4	Halmahera Timur	56,44
5	Nunukan	55,08
6	Tanah Laut	54,22
7	Mimika	52,28
8	Kolaka	51,20
9	Tanah Bumbu	51,03
10	Kutai Timur	50,56
11	Balangan	50,29
12	Samarinda	47,87
13	Muara Enim	46,67
14	Tabalong	46,23
15	Berau	46,19
16	Kutai Kartanegara	45,63
17	Minahasa Utara	45,22
18	Tapanuli Selatan	40,54
19	Bangka	30,56
20	Halmahera Utara	21,38



4. Ruang untuk Peningkatan Provinsi

Ruang untuk Peningkatan

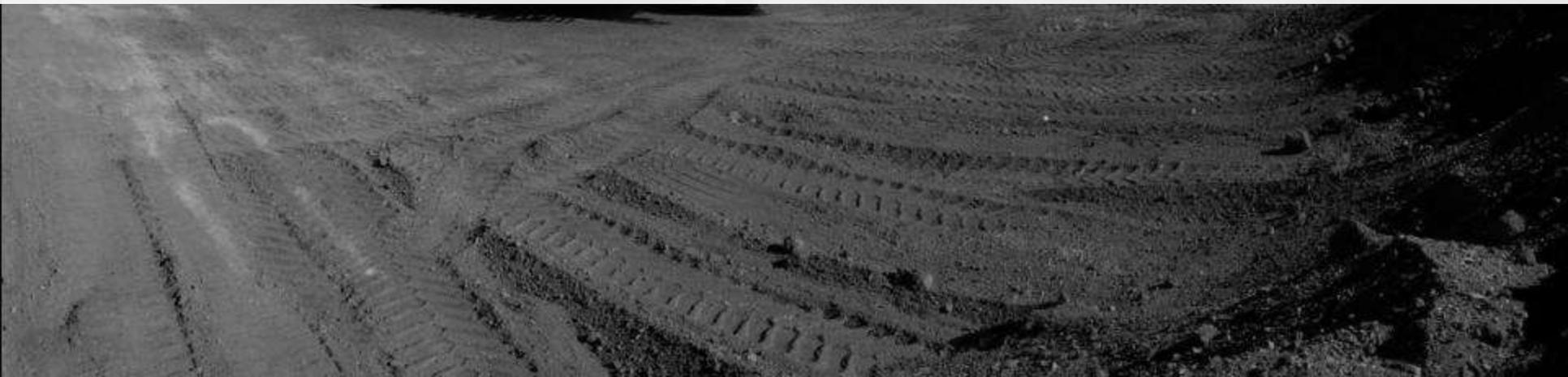
Room for Improvement		
Ranking	Provinsi	Nilai
1	Nusa Tenggara Barat	64,35
2	Sulawesi Selatan	62,53
3	Kalimantan Tengah	57,43
4	Maluku Utara	56,44
5	Kalimantan Utara	55,08
6	Papua	52,28
7	Sulawesi Tenggara	51,20
8	Kalimantan Selatan	50,00
9	Kalimantan Timur	47,42
10	Sumatera Selatan	46,67
11	Sulawesi Utara	45,22
12	Sumatera Utara	40,54
13	Bangka Belitung	30,56
14	Maluku	21,38



5. Indeks Komposit

Merupakan Indeks gabungan yang menggambarkan keadaan kebijakan dari suatu daerah dan potensi sumber daya pada daerah tersebut

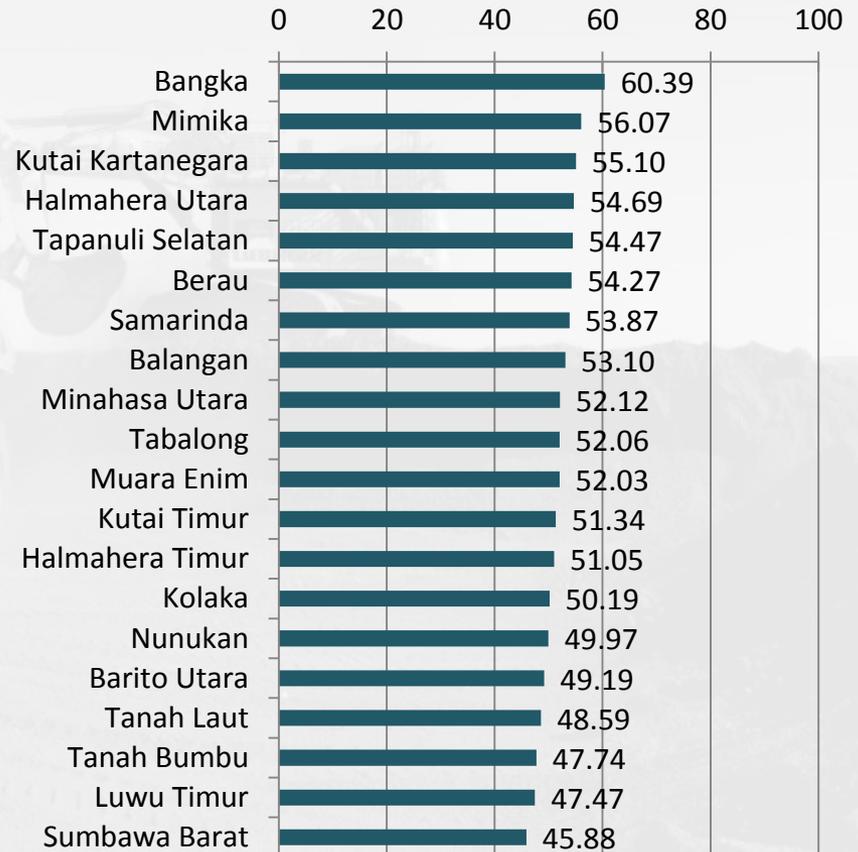
Dinilai dari rata-rata hasil Indeks Potensi Kebijakan dan Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice* dengan pembobotan berturut-turut 40 : 60. Diasumsikan bahwa potensi sumber daya lebih mempengaruhi keadaan pertambangan di suatu daerah.



5. Indeks Komposit Kabupaten

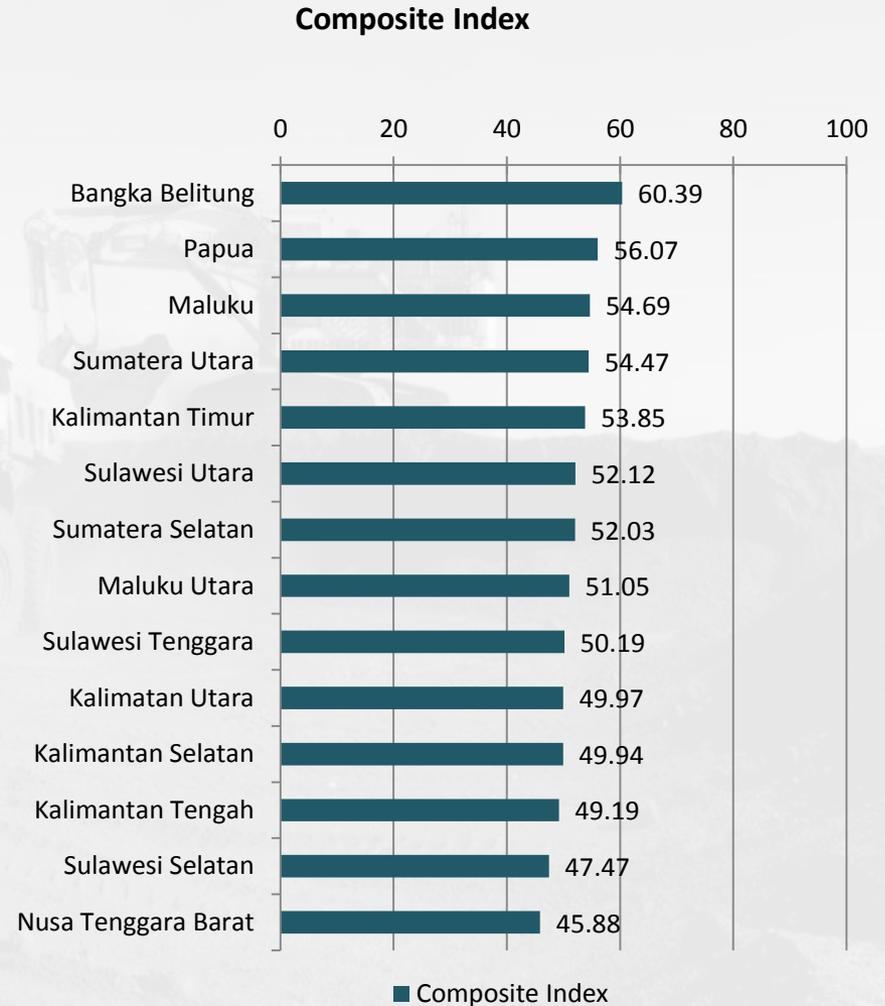
Composite Index		
Ranking	Kabupaten/Kota	Nilai 2015
1	Bangka	60,39
2	Mimika	56,07
3	Kutai Kartanegara	55,10
4	Halmahera Utara	54,69
5	Tapanuli Selatan	54,47
6	Berau	54,27
7	Samarinda	53,87
8	Balangan	53,10
9	Minahasa Utara	52,12
10	Tabalong	52,06
11	Muara Enim	52,03
12	Kutai Timur	51,34
13	Halmahera Timur	51,05
14	Kolaka	50,19
15	Nunukan	49,97
16	Barito Utara	49,19
17	Tanah Laut	48,59
18	Tanah Bumbu	47,74
19	Luwu Timur	47,47
20	Sumbawa Barat	45,88

Tahun 2015



5. Indeks Komposit Provinsi

Composite Index		
Ranking	Provinsi	Nilai
1	Bangka Belitung	60,39
2	Papua	56,07
3	Maluku	54,69
4	Sumatera Utara	54,47
5	Kalimantan Timur	53,85
6	Sulawesi Utara	52,12
7	Sumatera Selatan	52,03
8	Maluku Utara	51,05
9	Sulawesi Tenggara	50,19
10	Kalimantan Utara	49,97
11	Kalimantan Selatan	49,94
12	Kalimantan Tengah	49,19
13	Sulawesi Selatan	47,47
14	Nusa Tenggara Barat	45,88



6. Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan

Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute

Indeks	IMI	Fraser
	2015	2015
Indeks Potensi Kebijakan	10,92	12,02
Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini	30,54	29
Indeks Potensi Sumber Daya <i>Best Practice</i>	79,94	82
Ruang untuk Peningkatan	49,40	53
Indeks Komposit	52,33	54

7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan Secara Keseluruhan

Peringkat	Hambatan yang dihadapi
1	Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
2	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
3	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten
4	Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
5	Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
6	Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
7	Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi
8	Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan)
9	Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)

7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan Secara Keseluruhan (lanjutan)

Peringkat	Hambatan yang dihadapi
10	Ketersediaan infrastruktur
11	Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat
12	Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien)
13	Keamanan lokal
14	Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
15	Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau rumah sakit,)
16	Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan
17	Peraturan ketenagakerjaan

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten

Berikut merupakan uraian hambatan yang yang paling dirasakan oleh pelaku pertambangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas kebijakan di masing-masing kabupaten.

Kabupaten/ Kota	Hambatan utama yang dihadapi
Tapanuli Selatan	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Muara Enim	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Bangka	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten

Kabupaten/ Kota	Hambatan utama yang dihadapi
Barito Utara	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Nunukan	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Berau	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Samarinda	<ul style="list-style-type: none">• Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan)• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten

Kabupaten/ Kota	Hambatan utama yang dihadapi
Tanah Bumbu	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Tanah Laut	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Tabalong	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Balangan	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Mimika	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen• Ketersediaan infrastruktur
Sumbawa Barat	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten

Kabupaten/ Kota	Hambatan utama yang dihadapi
Halmahera Utara	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Halmahera Timur	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Kolaka	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Minahasa Utara	<ul style="list-style-type: none">• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah

4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA

A large yellow mining truck is driving on a dirt road in a quarry. The truck is viewed from the side, moving away from the camera. The ground is reddish-brown dirt with visible tire tracks. In the background, there are mountains and a clear blue sky. A semi-transparent dark blue banner is overlaid on the image, containing the text.

Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit

	Ranking		Nilai	
BANGKA	13	▲ 1	49,78	▲ 60,39
MIMIKA	15	▲ 2	47,61	▲ 56,1
KUTAI KARTANEGARA	2	▼ 3	55,66	▼ 55,1
HALMAHERA UTARA	4		54,7	

Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit

	Ranking		Nilai	
TAPANULI SELATAN	17	▲ 5	47,12	▲ 54,5
BERAU	5	▼ 6	54,6	▼ 54,3
SAMARINDA	12	▲ 7	50,29	▲ 53,9
BALANGAN	9	▲ 8	53,12	▲ 53,1

Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit

	Ranking		Nilai	
MINAHASA UTARA	9		52,1	
TABALONG	9	▼ 10	53,12	▼ 52,1
MUARA ENIM	4	▼ 11	54,62	▼ 52
KUTAI TIMUR	1	▼ 12	62,5	▼ 51,3

Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit

	Ranking		Nilai	
HALMAHERA TIMUR	13		51,1	
KOLAKA	3	▼ 14	55,2	▼ 50,2
NUNUKAN	14	▼ 15	47,65	▼ 50
BARITO UTARA	8	▼ 16	53,63	▼ 49,2

Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit

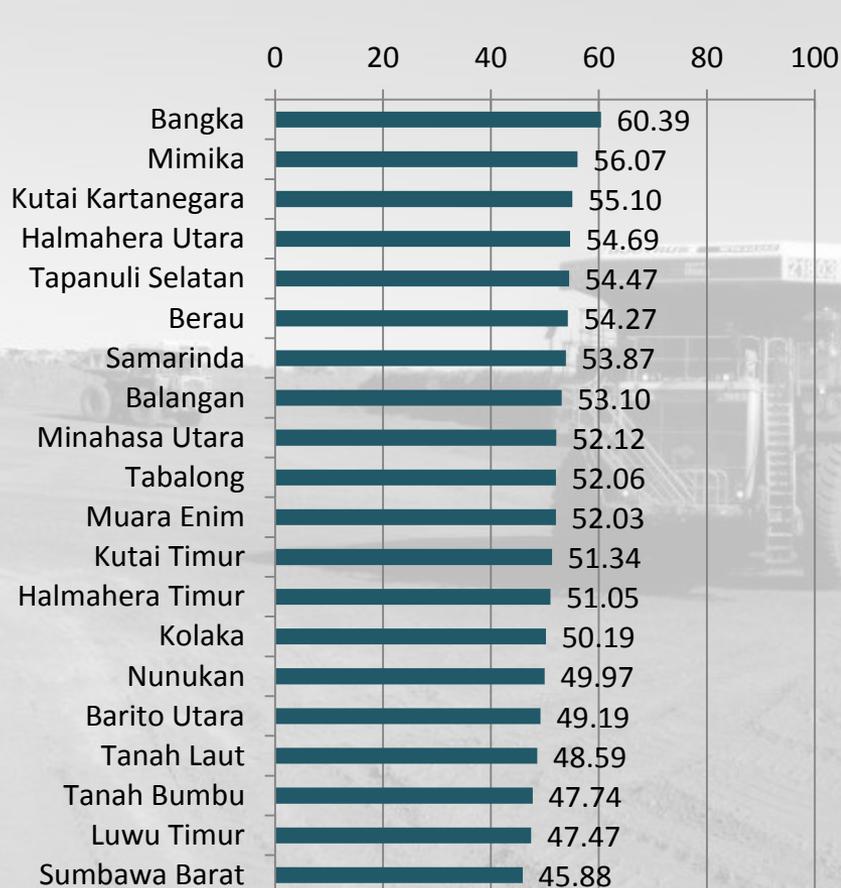
	Ranking		Nilai	
TANAH LAUT	17		48,6	
TANAH BUMBU	16	▼ 18	47,17	▼ 47,7
LUWU TIMUR	11	▼ 19	52,87	▼ 47,5
SUMBAWA BARAT	6	▼ 20	53,82	▼ 45,9

4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA

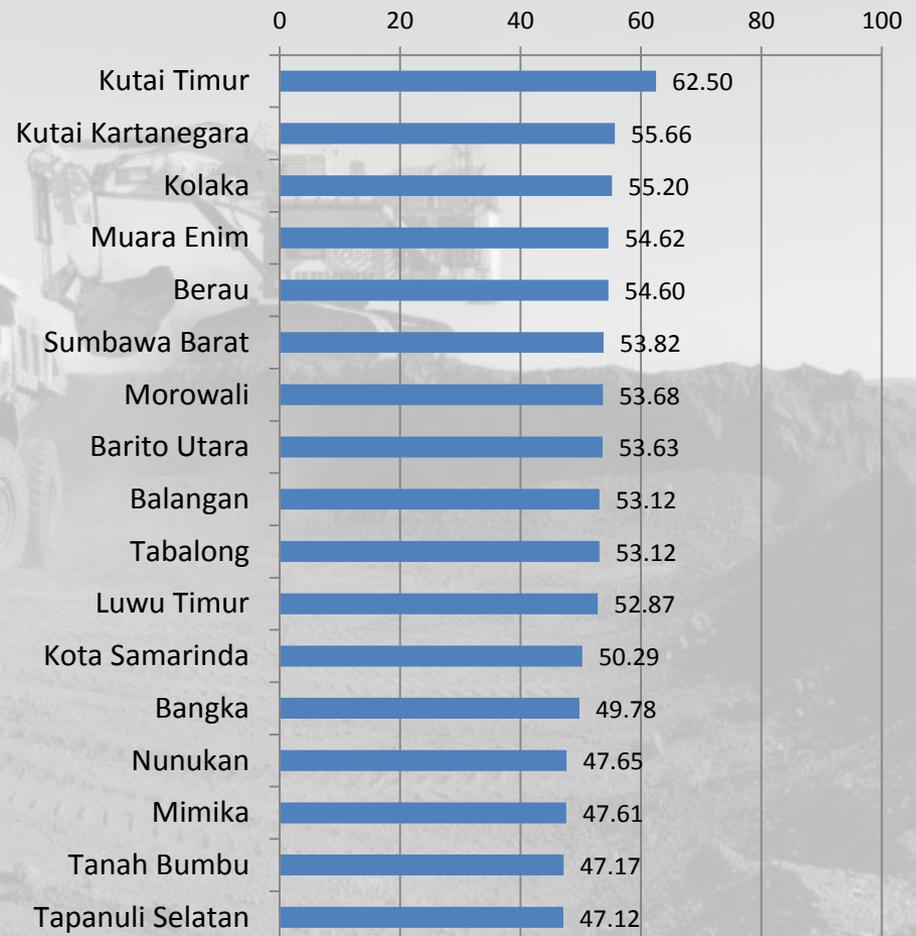


Perbandingan Indeks Komposit Kabupaten

Tahun 2015



Tahun 2013-2014



Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan

Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute

Indeks	IMI		Fraser			
	2013 - 2014	2015	2012 - 2013	2013	2014	2015
Indeks Potensi Kebijakan	13,29	10,92	9,4	15,30	15,83	12,02
Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini	34,89	30,54	25	23	22	29
Indeks Potensi Sumber Daya <i>Best Practice</i>	80,48	79,94	79	73	69	82
Ruang untuk Peningkatan	45,59	49,40	54	50	47	53
Indeks Komposit	53,60	52,33	51,16	49,8	47	54

5. ANALISIS



Permasalahan utama yang dihadapi di Indonesia secara keseluruhan meliputi **ketidakpastian** dalam penyelesaian klaim tanah sengketa dan tumpang tindih serta **inkonsistensi peraturan** dan kewenangan baik antardepartemen maupun antara pusat dan daerah.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut, solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem penerapan peraturan perundang-undangan di daerah adalah:

- i. Adanya **kebijakan pertambangan** yang mengatur mengenai penguasaan, pengelolaan, pengusahaan sumber daya mineral dan batubara yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
- ii. **Penyesuaian** pelimpahan kekuasaan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah.
- iii. Penerapan ***Good Governance***.

i. Adanya Kebijakan Pertambangan

Kebijakan pertambangan merupakan koridor dari peraturan perundang-undangan pada sektor ini yang melibatkan sektor-sektor yang berkaitan dengan industri pertambangan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan eksternal seperti sengketa lahan dan permasalahan sosial lainnya

ii. Penyesuaian pelimpahan kekuasaan pemerintah daerah

Penyesuaian ini diperlukan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini menjadi salah satu factor yang mendorong urgensi perlunya revisi UU No. 4 Tahun 2009.

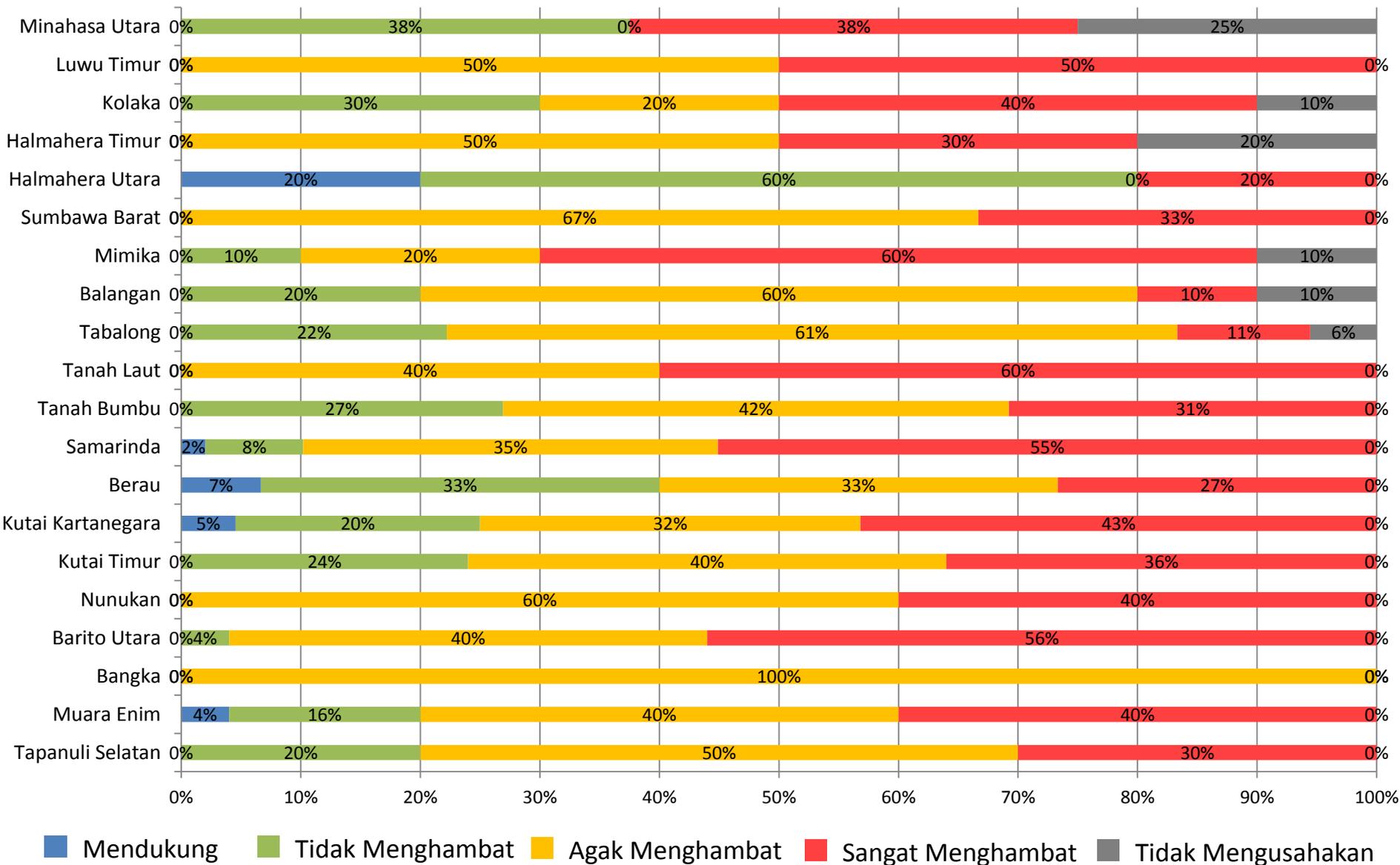
iii. Penerapan *Good Governance*

Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan keadaan negara yang stabil sehingga akan meningkatkan kepastian (certainty) iklim investasi bagi para penanam modal.

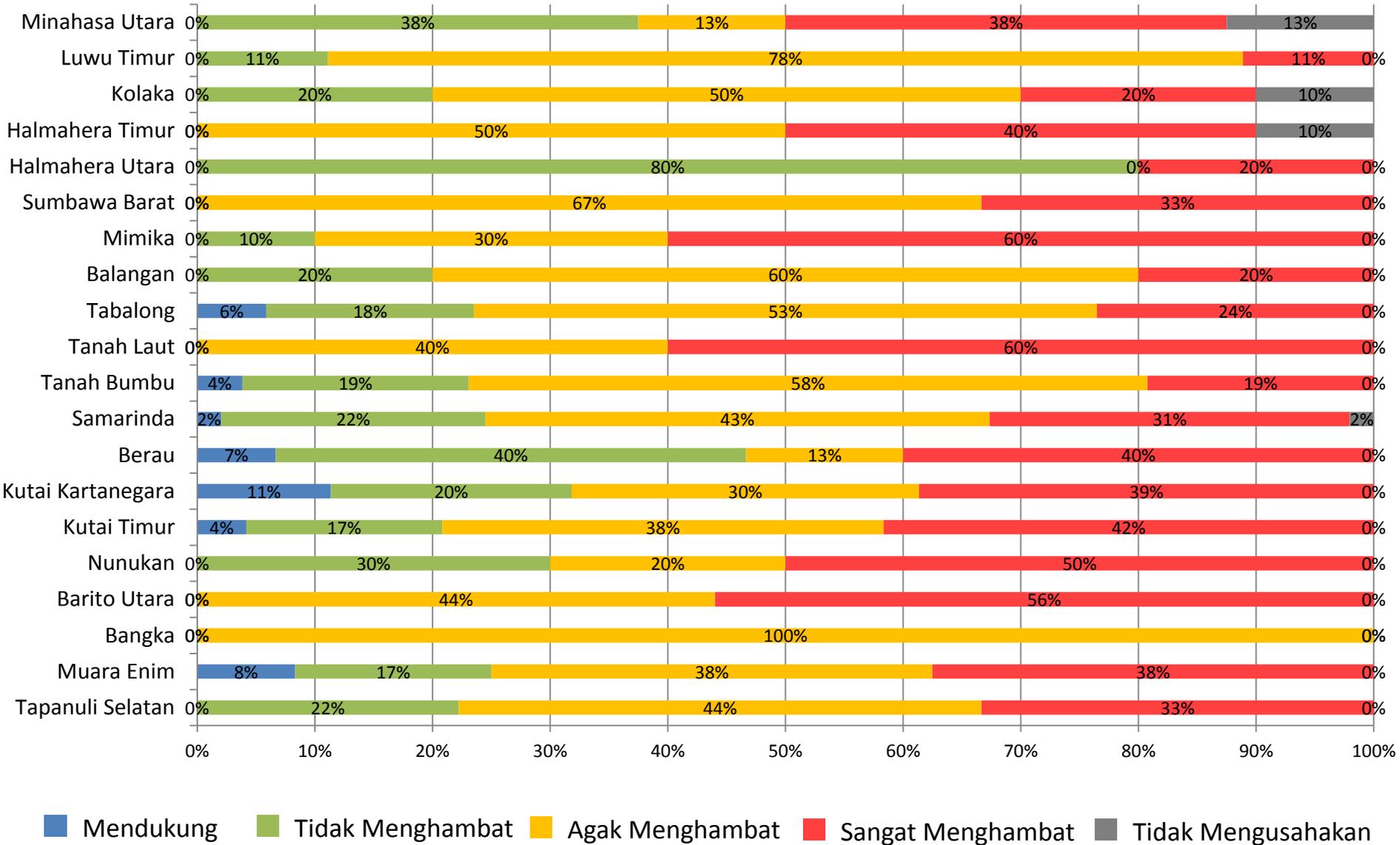
The background of the slide is a photograph of a mining site. In the foreground, a large yellow haul truck is parked on a dirt road with visible tire tracks. In the background, another haul truck is visible on a dirt road, and a large excavator is working on a pile of material. The sky is clear and blue.

TERIMA KASIH

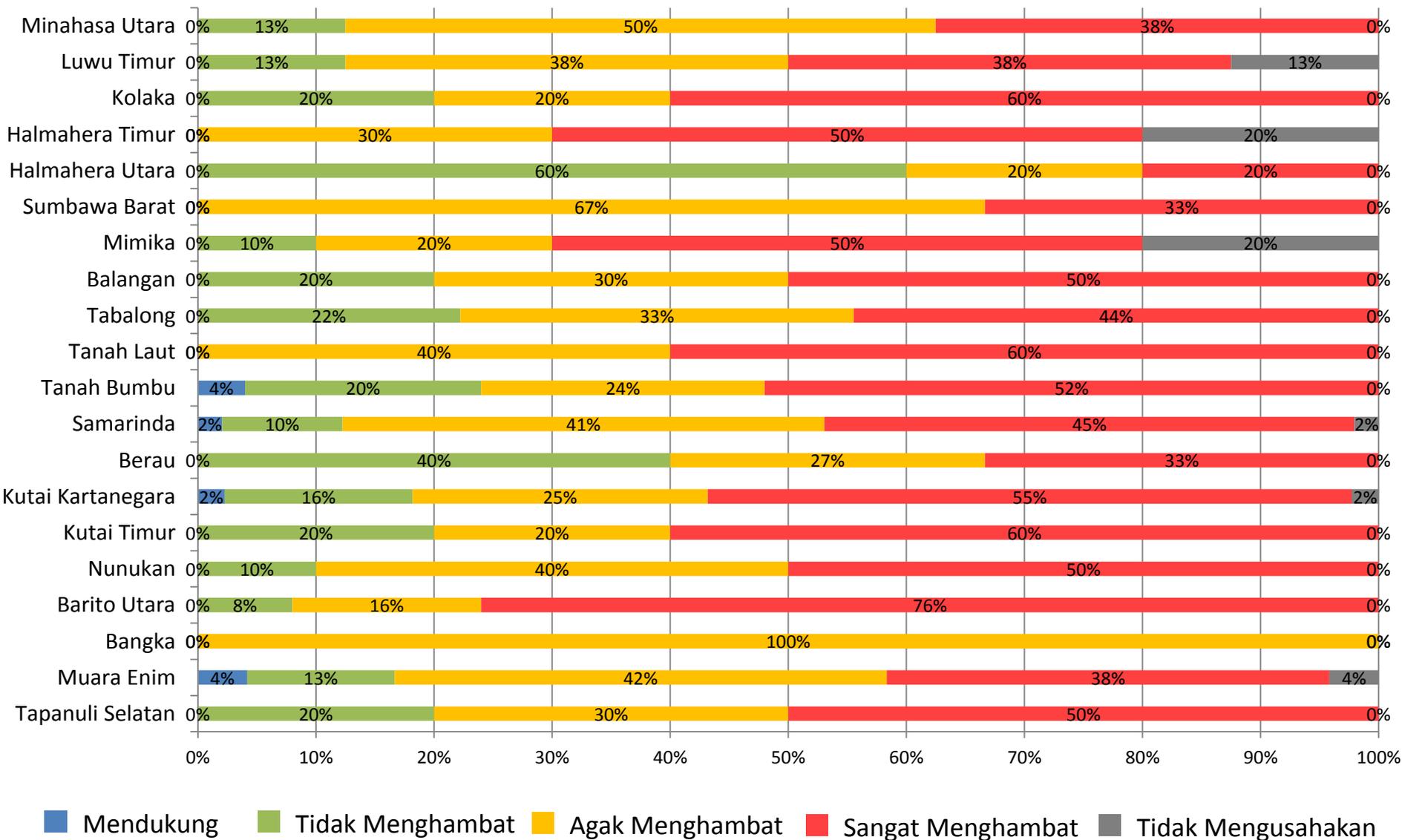
Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada



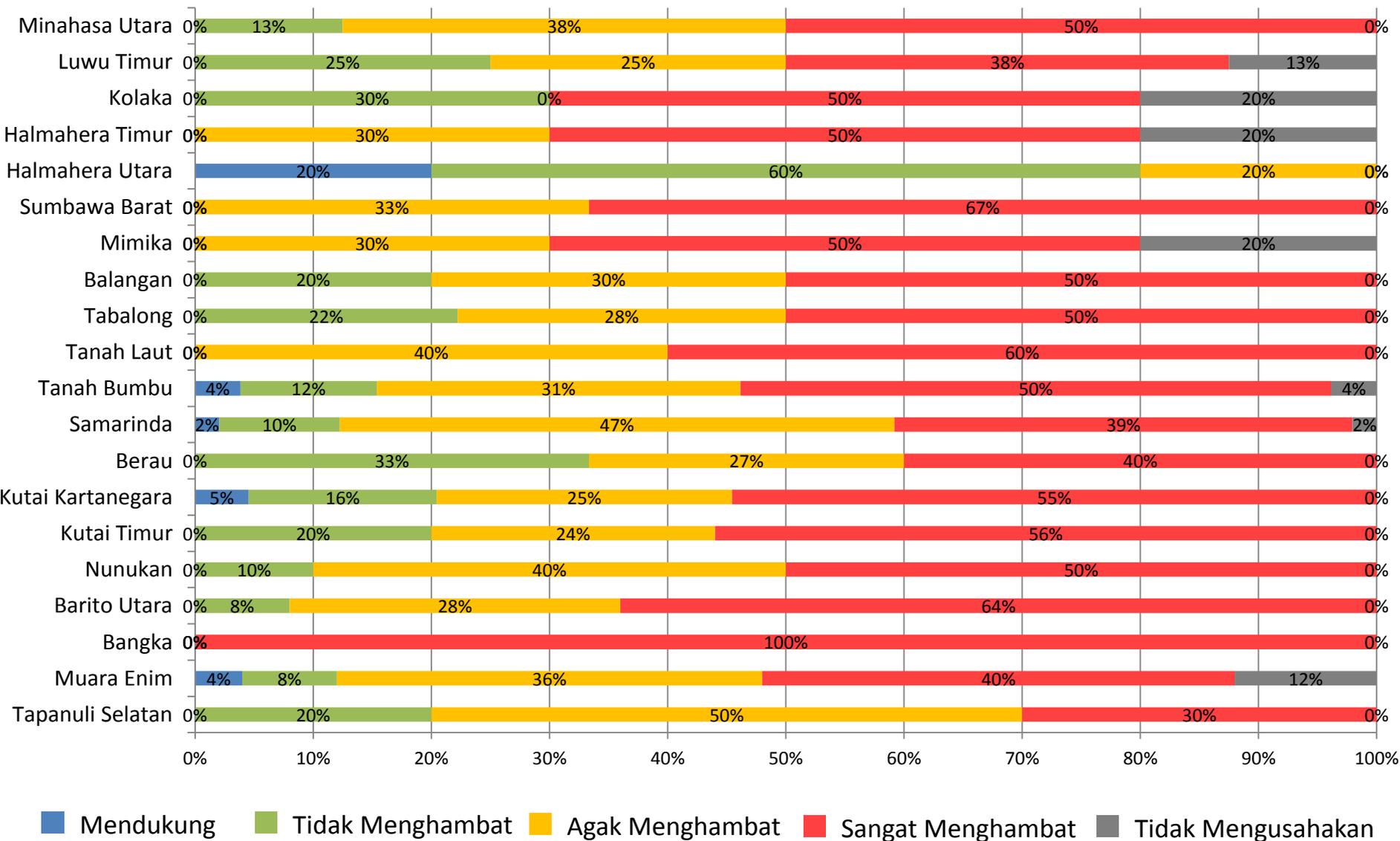
Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah



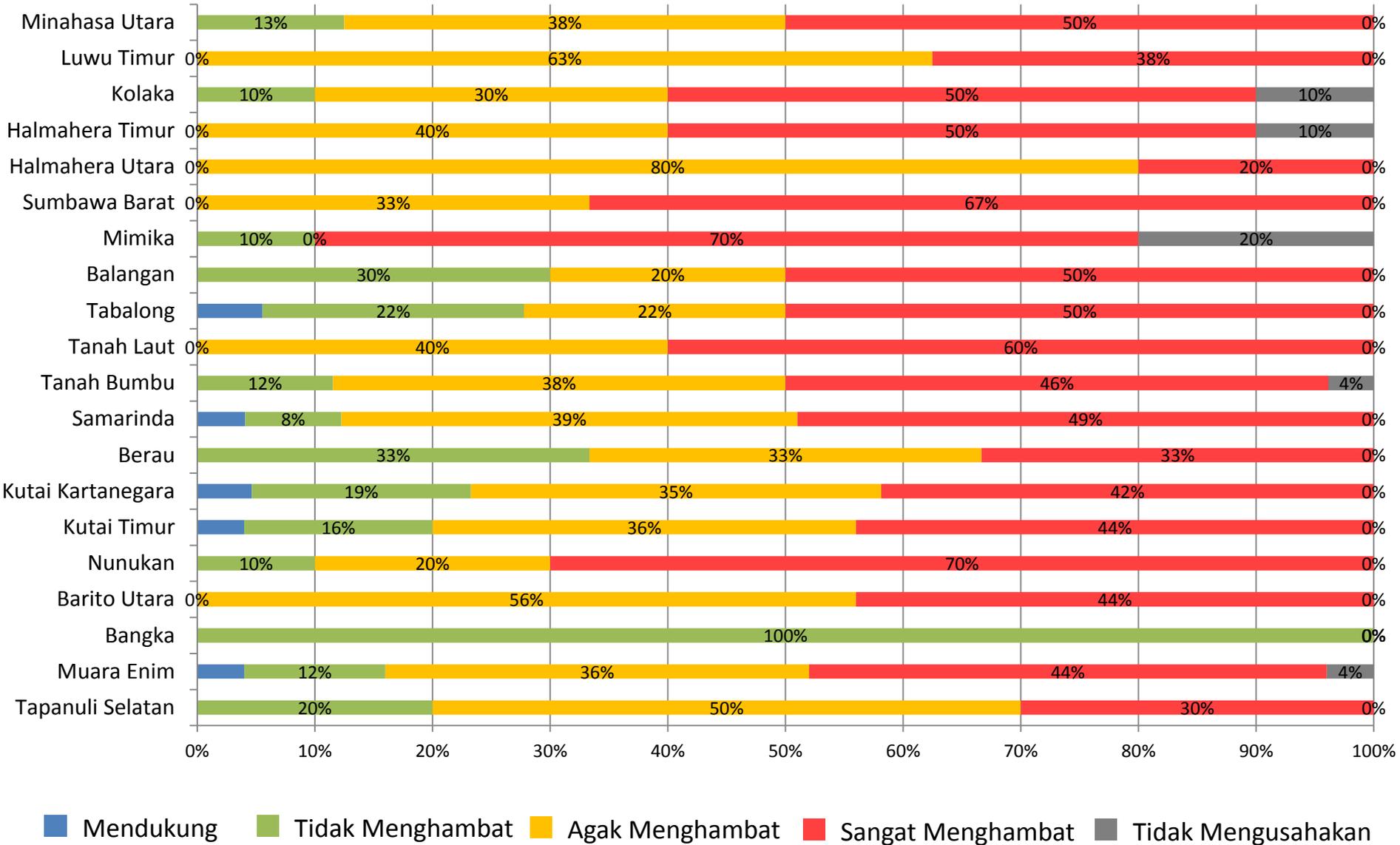
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten



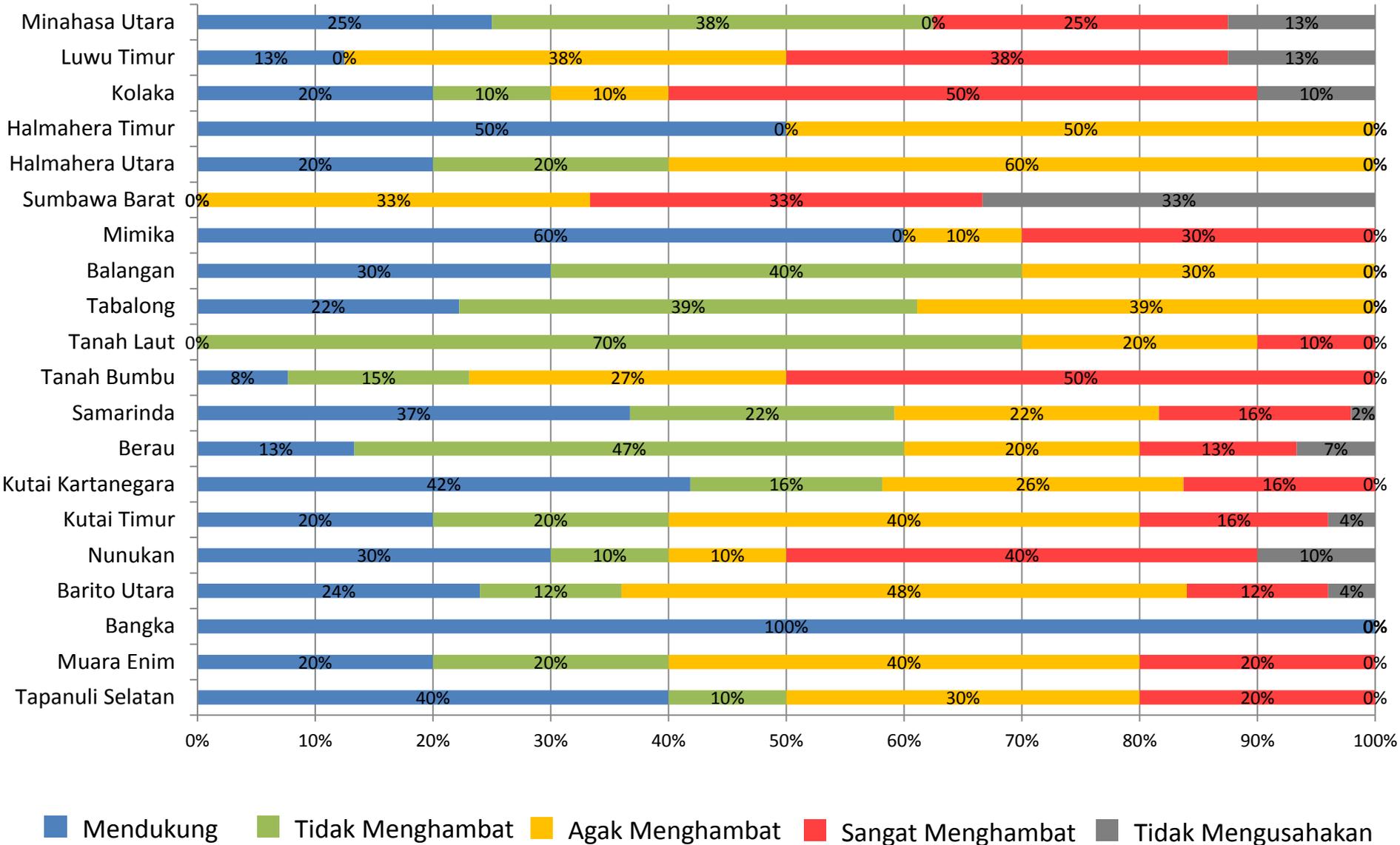
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen



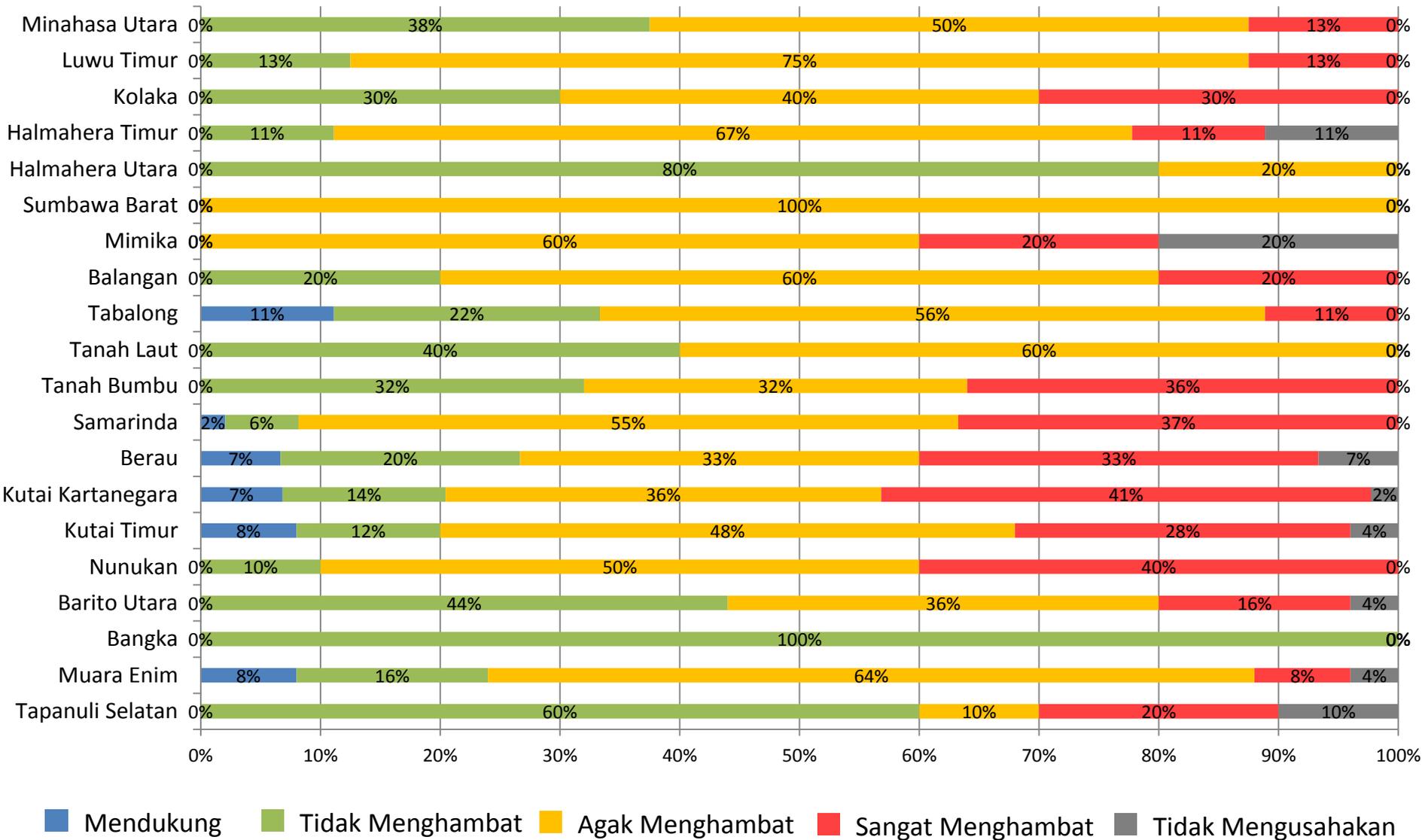
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antara pusat dengan daerah



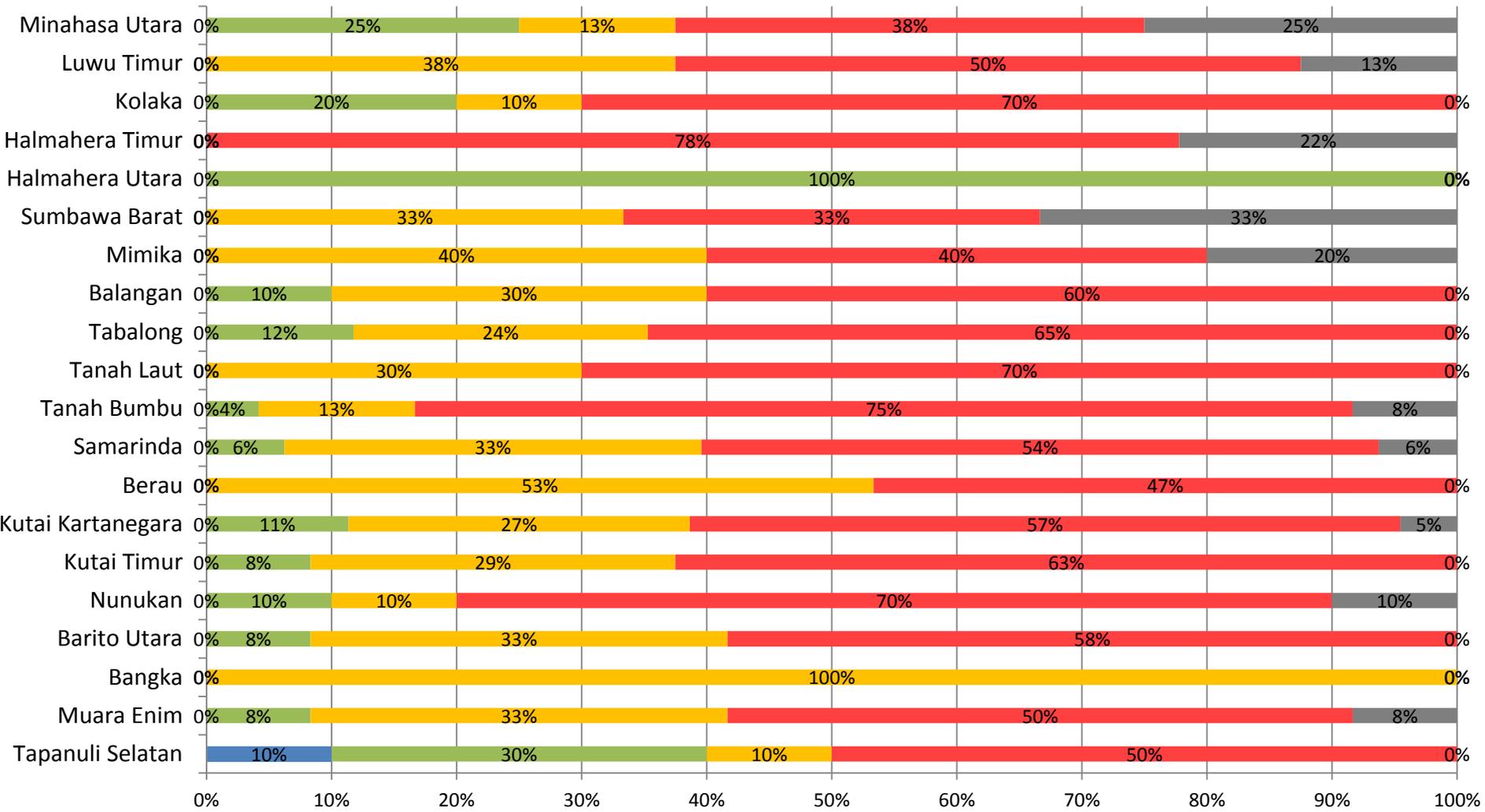
Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, dan tidak korup, tepat waktu, efisien)



Perpajakan

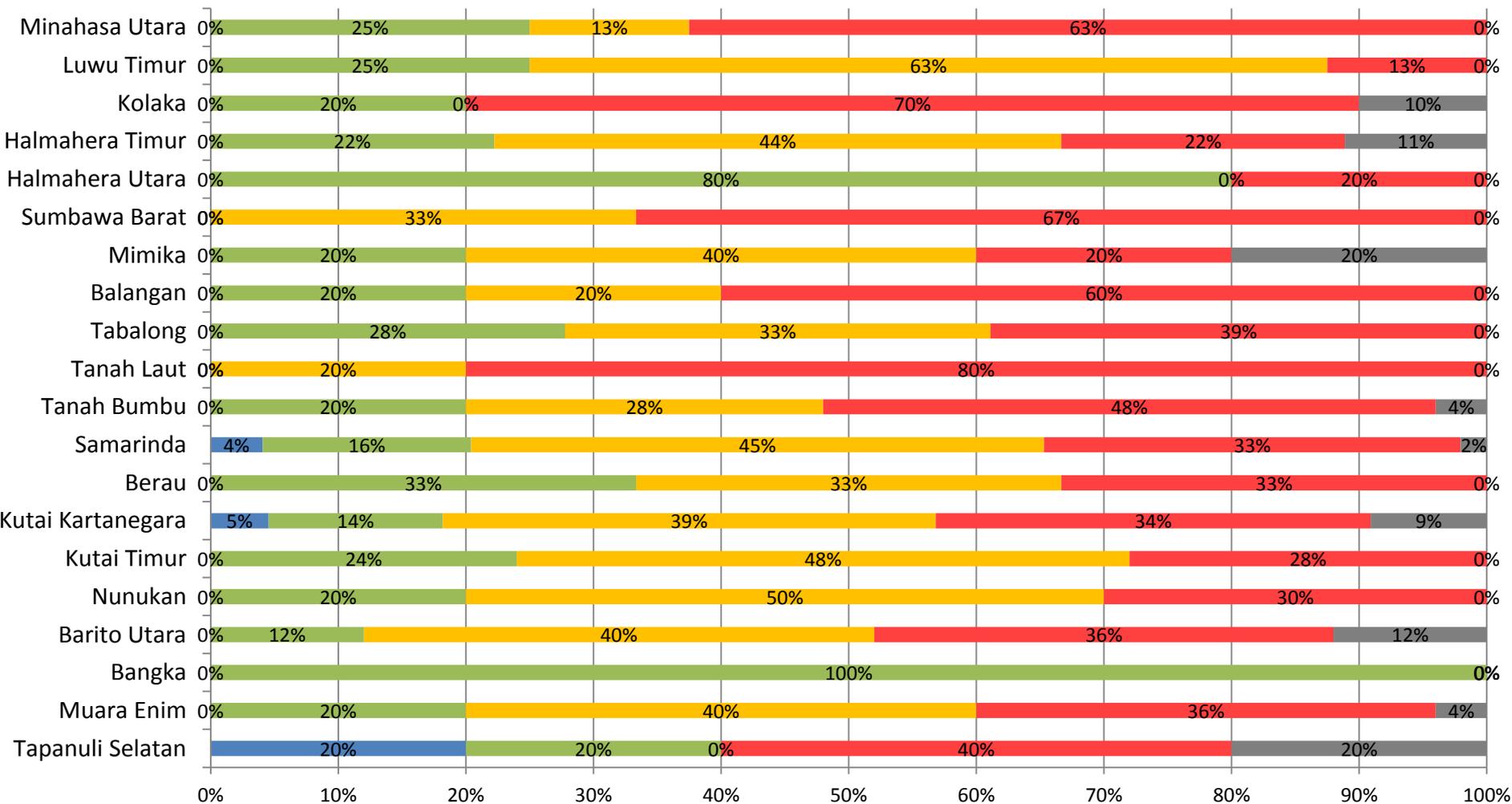


Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa



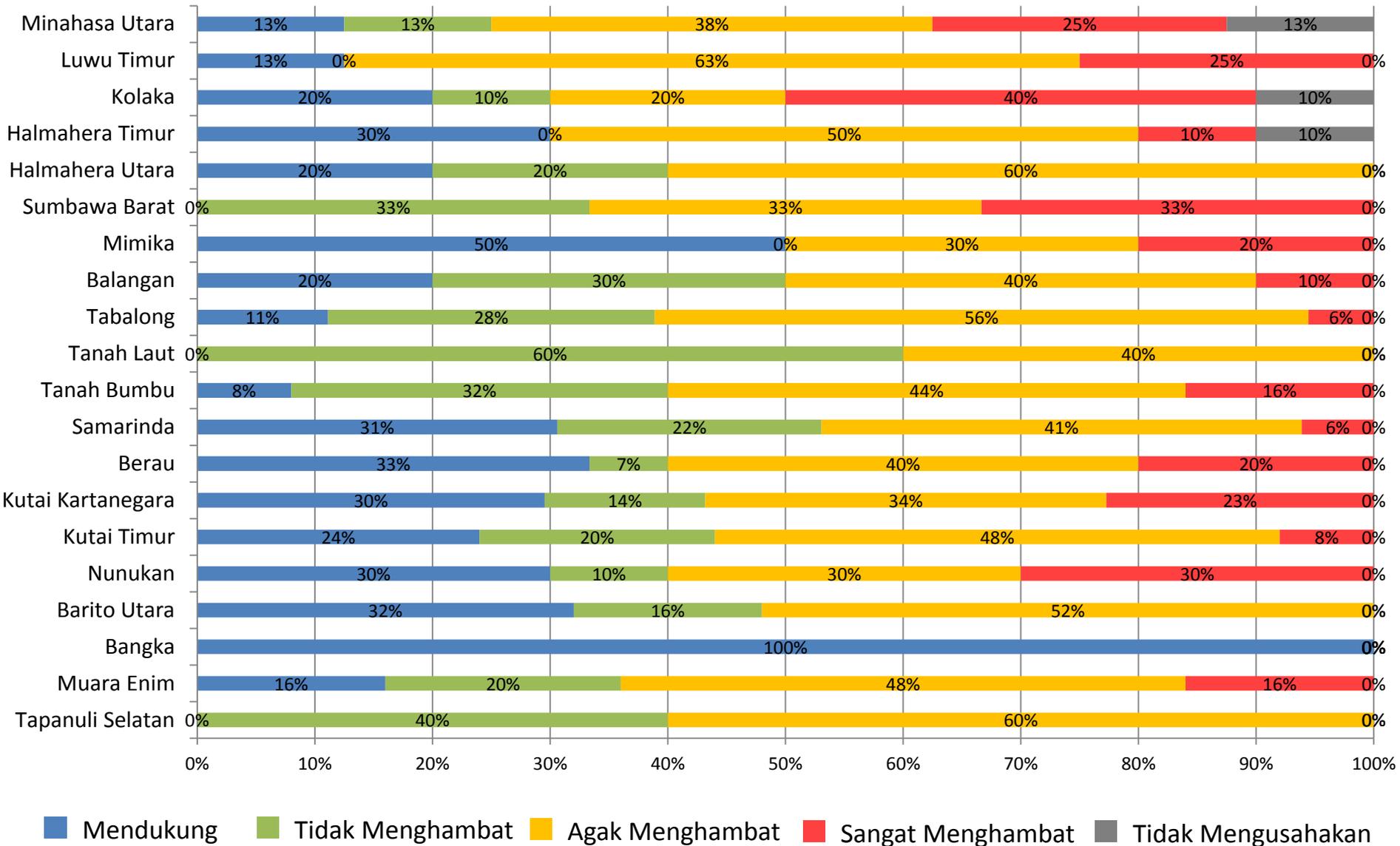
■ Mendukung
 ■ Tidak Menghambat
 ■ Agak Menghambat
 ■ Sangat Menghambat
 ■ Tidak Mengusahakan

Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi

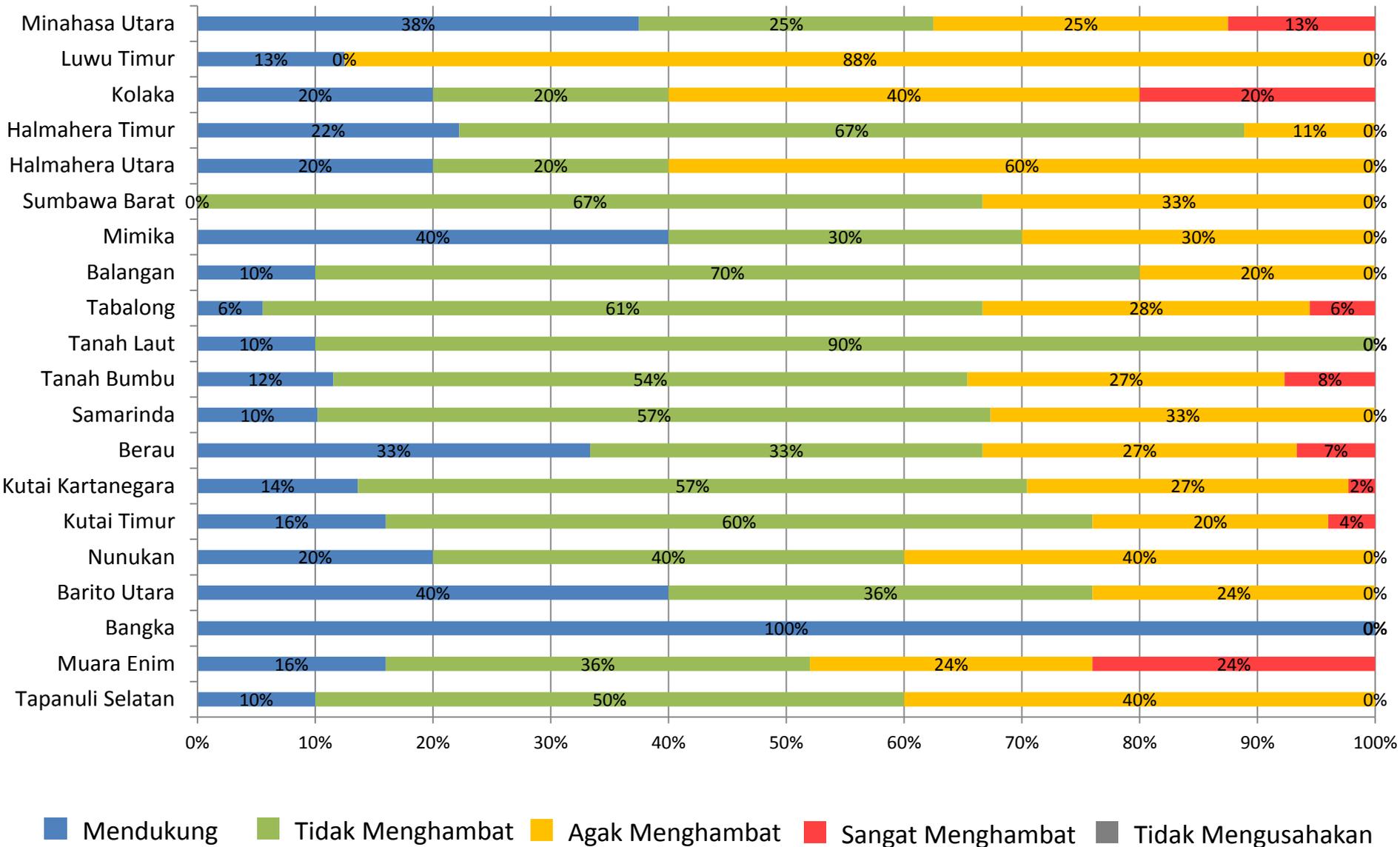


■ Mendukung
 ■ Tidak Menghambat
 ■ Agak Menghambat
 ■ Sangat Menghambat
 ■ Tidak Mengusahakan

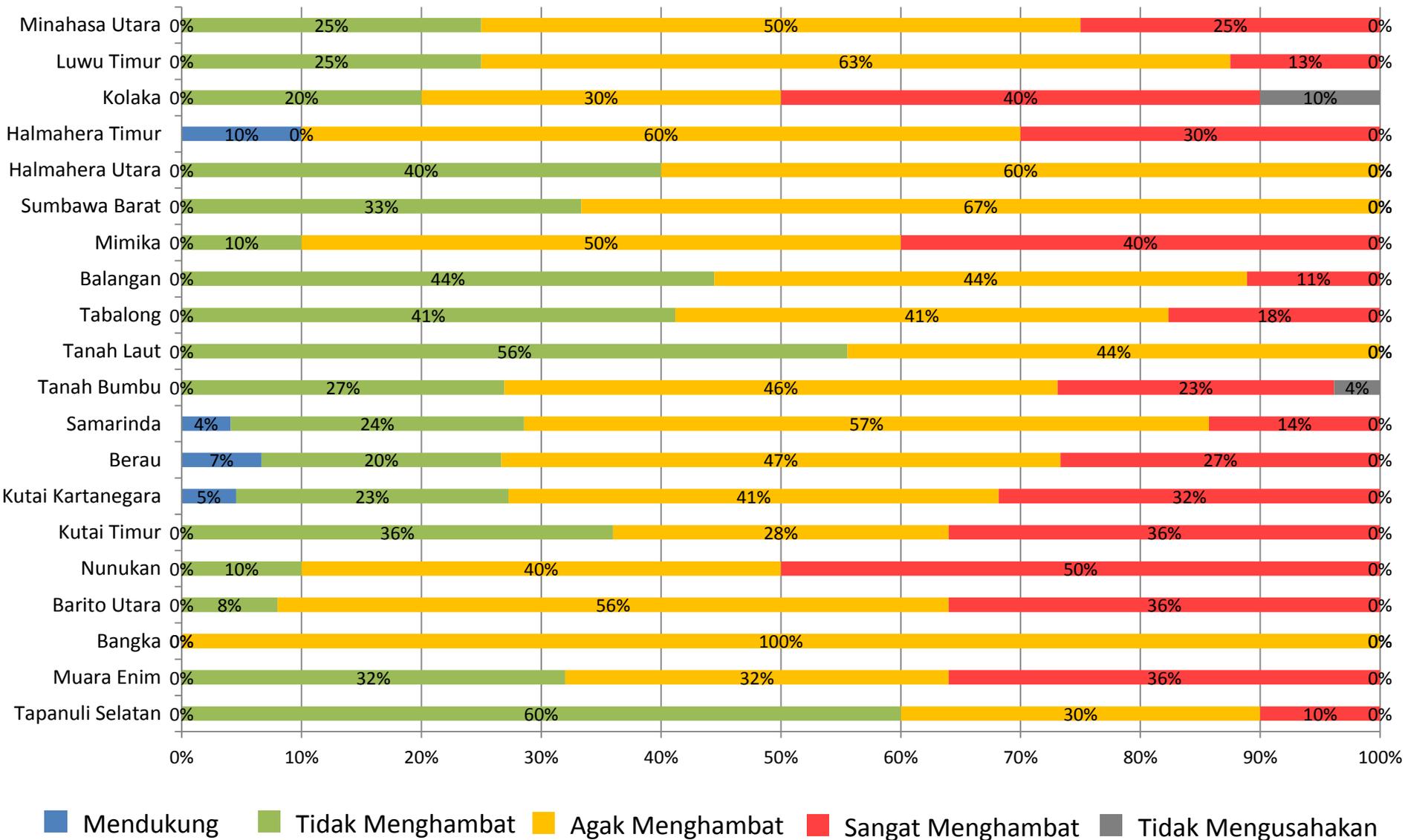
Ketersediaan infrastruktur



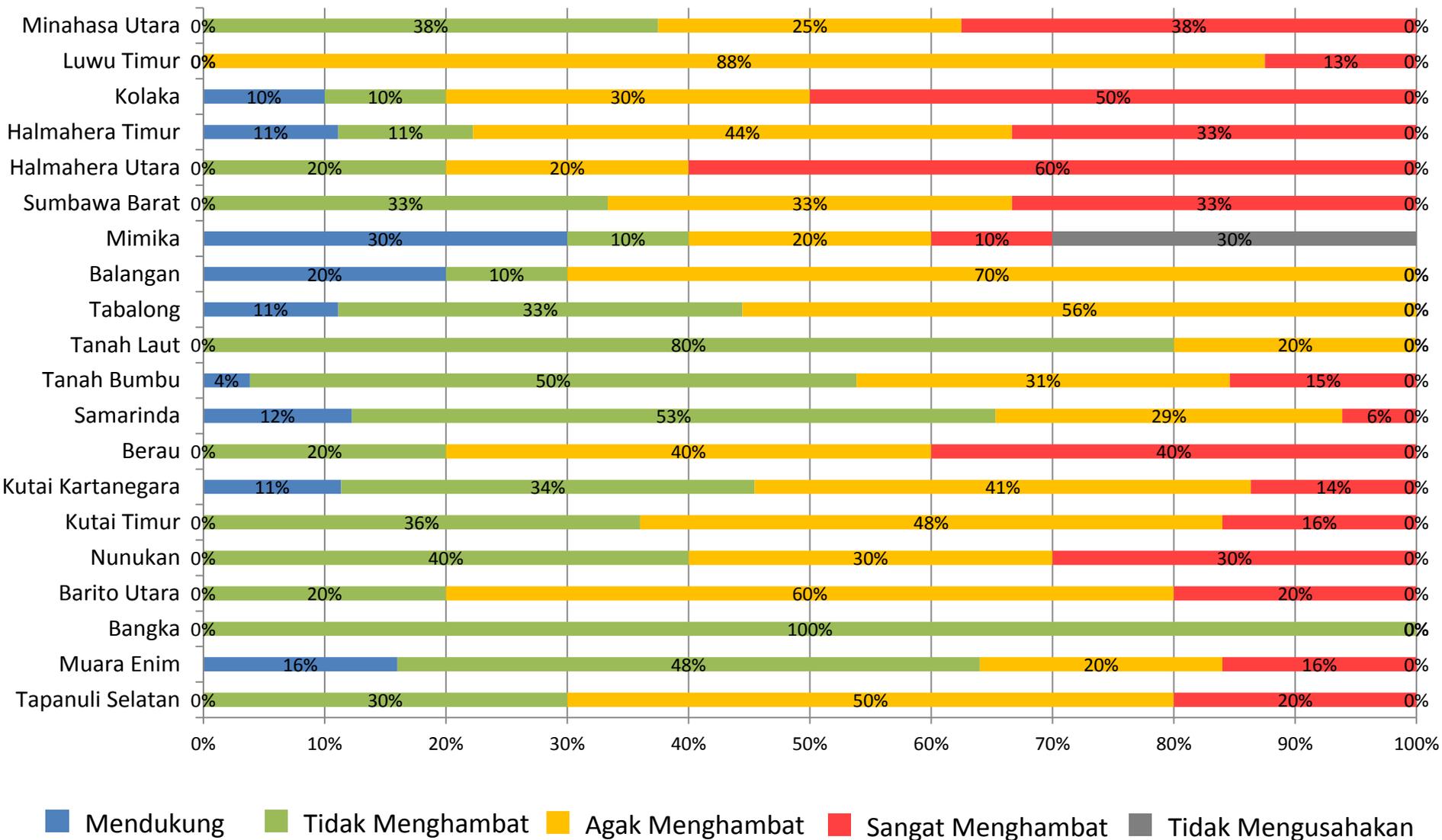
Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi



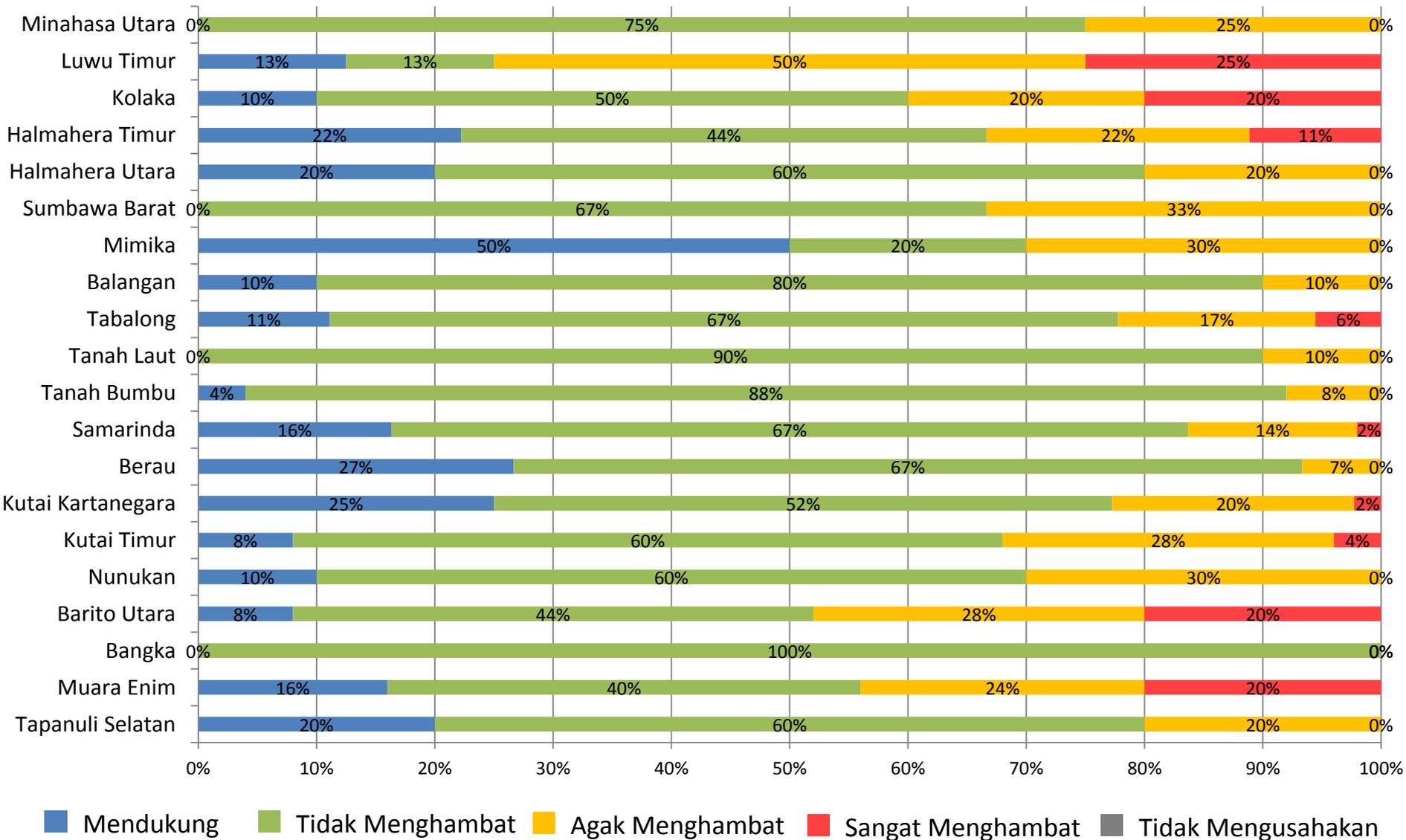
Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)



Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat



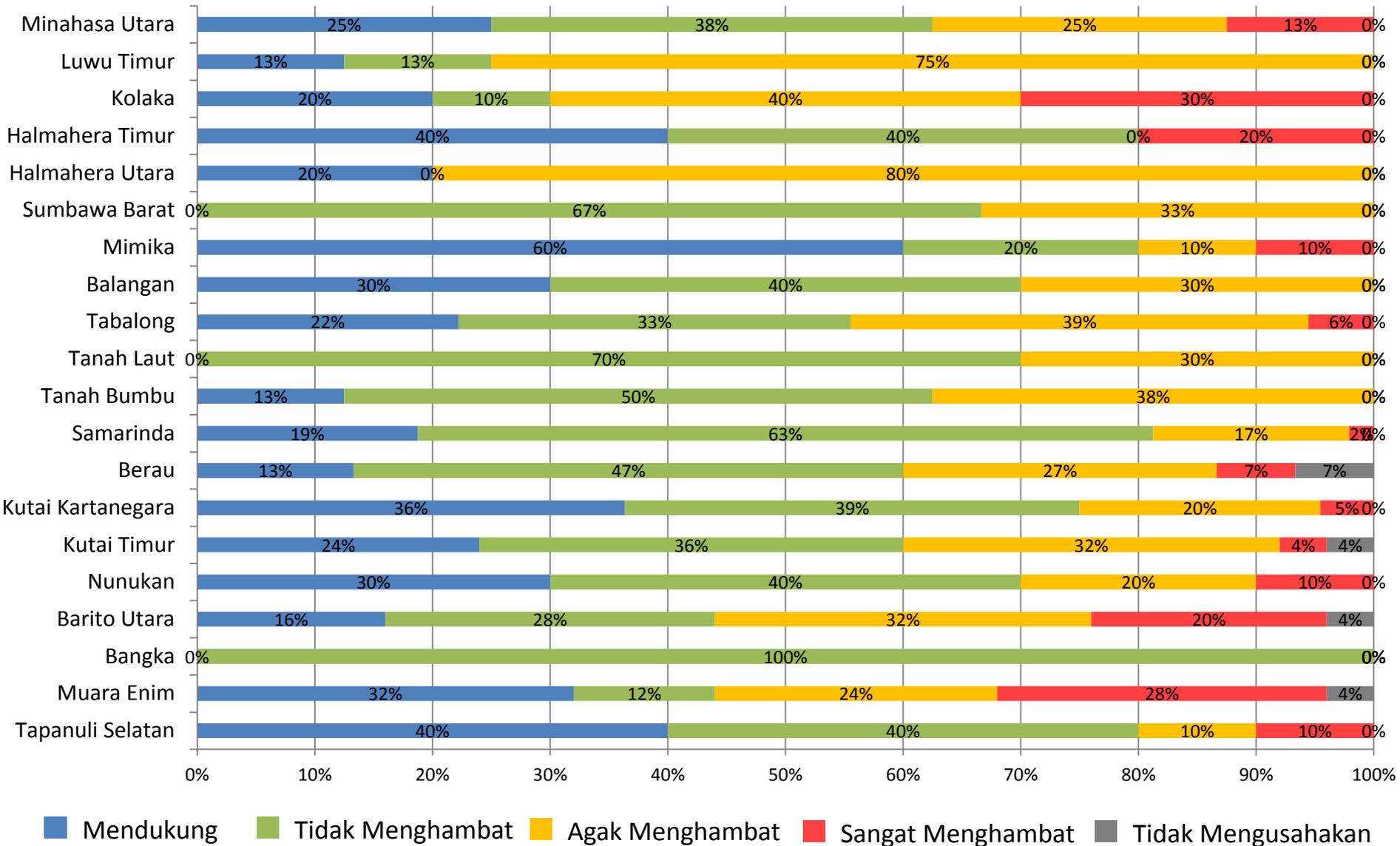
Peraturan Perburuhan / ketenagakerjaan



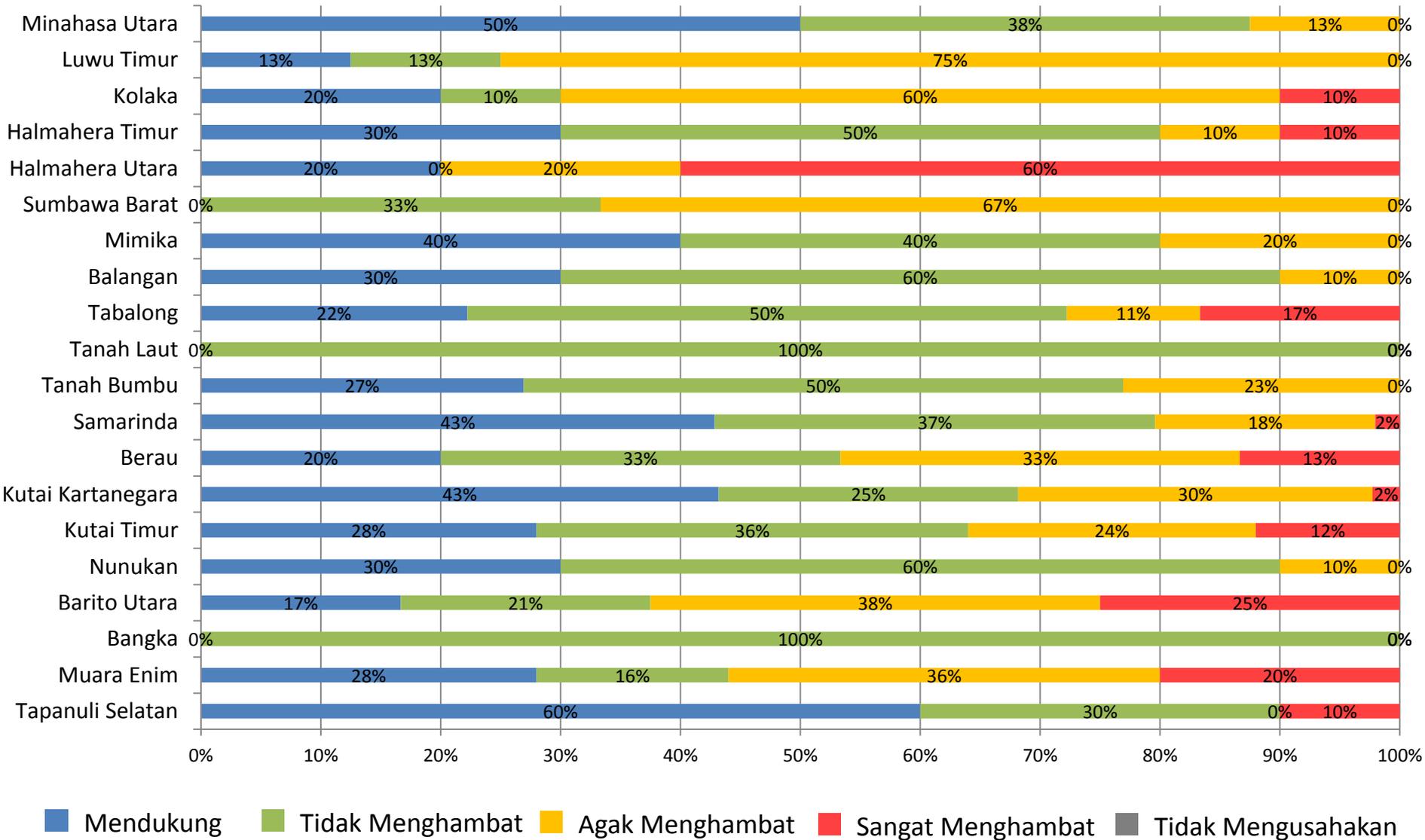
Keamanan lokal



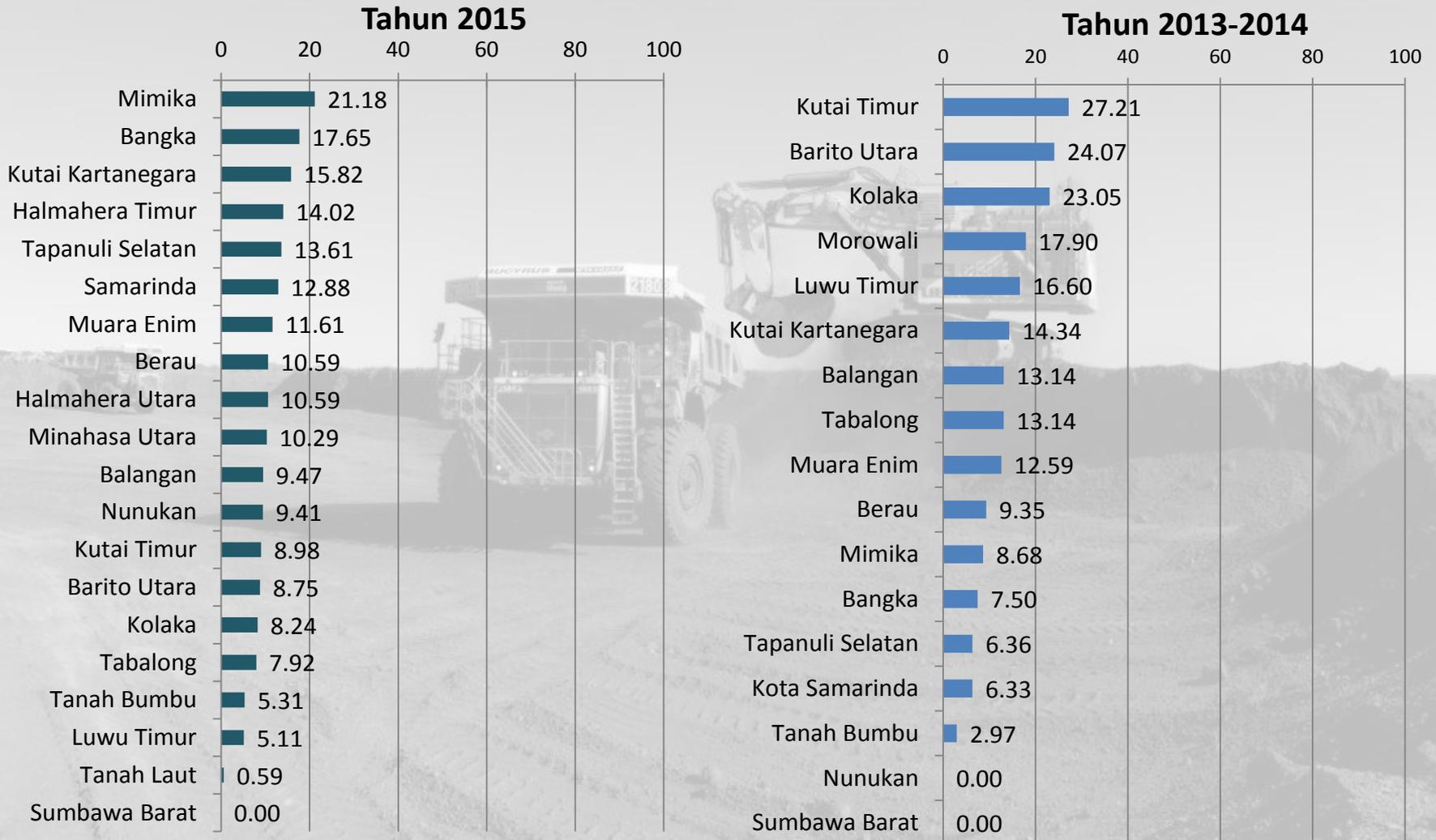
Ketersediaan tenaga kerja



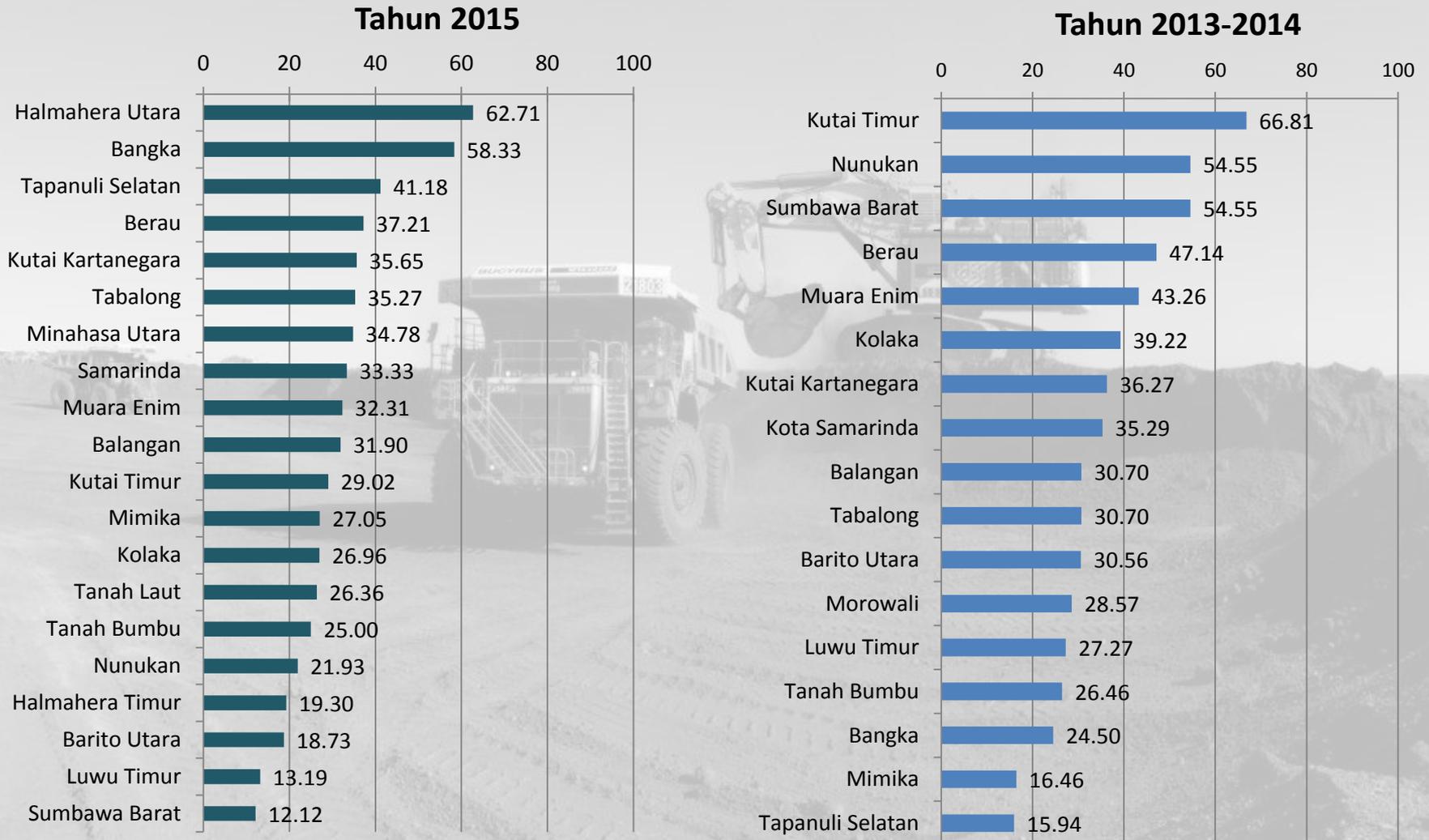
Tumbuh (atau berkurangnya) ketidakpastian dalam kebijakan lokal di bidang pertambangan dan implementasinya



1. Indeks Potensi Kebijakan Kabupaten

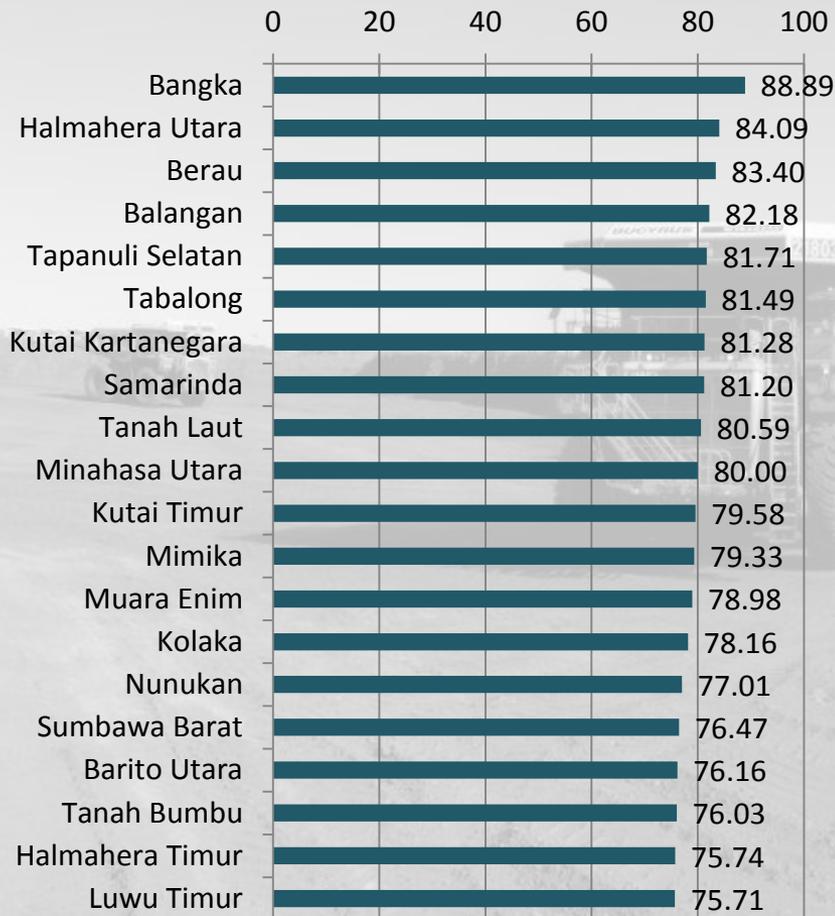


2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Kabupaten

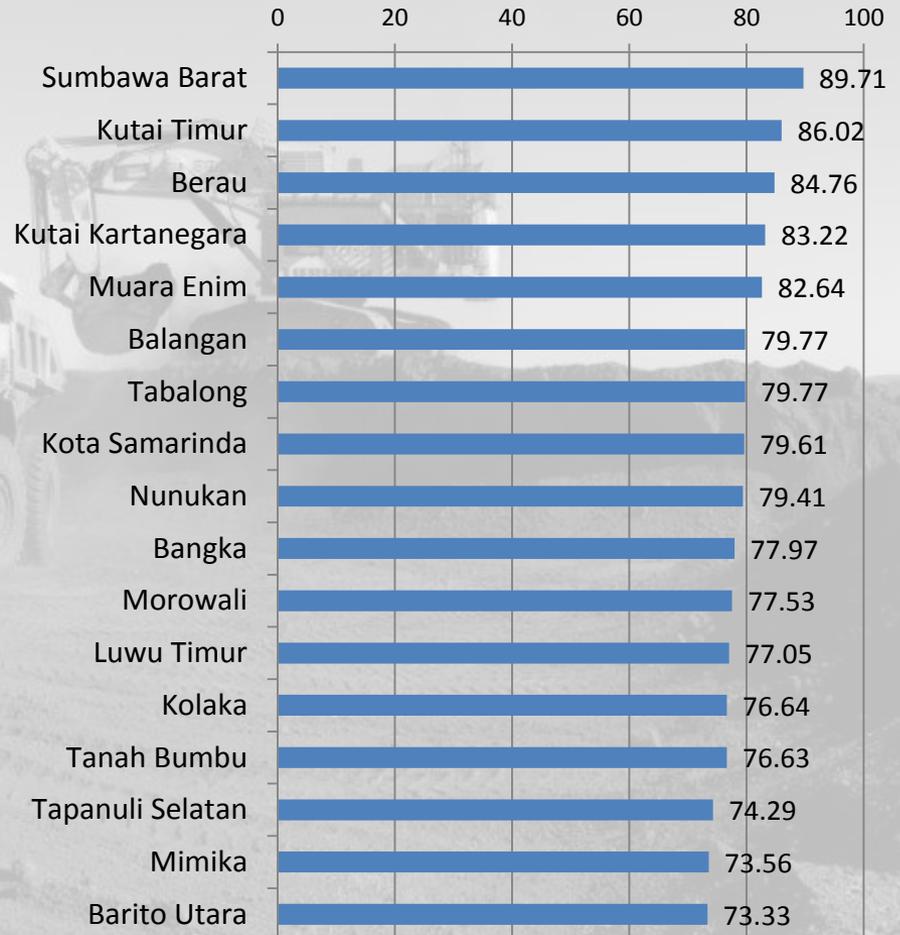


3. Indeks Potensi Sumber Daya *Best Practice* Kabupaten

Tahun 2015

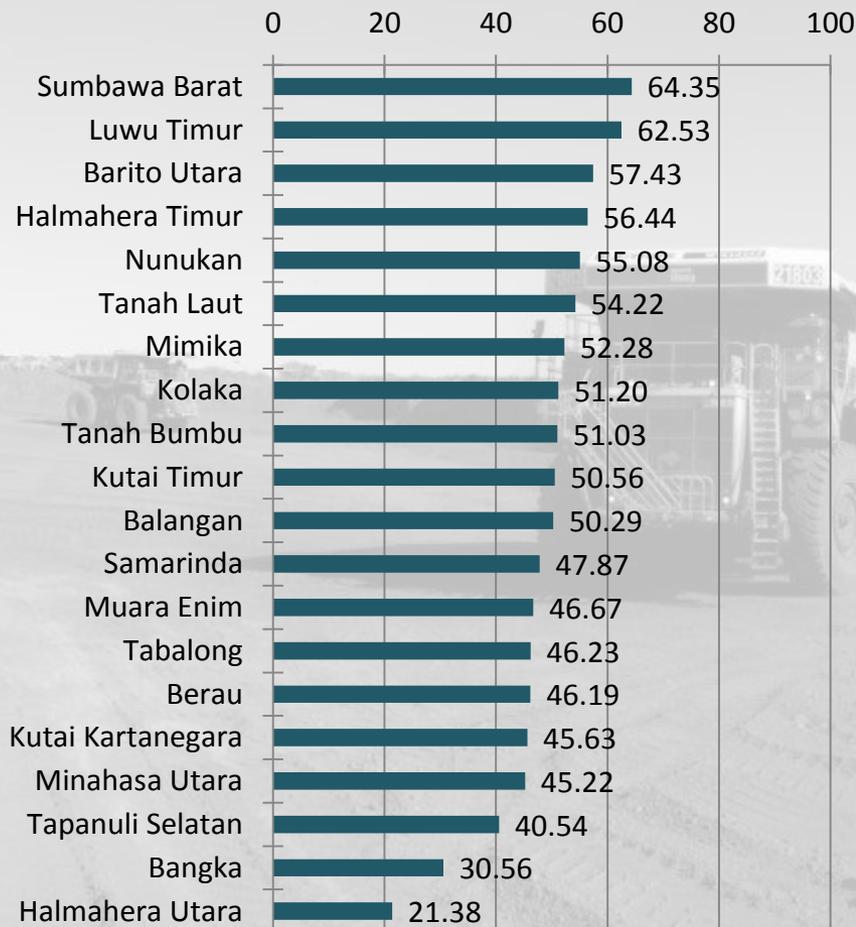


Tahun 2013-2014

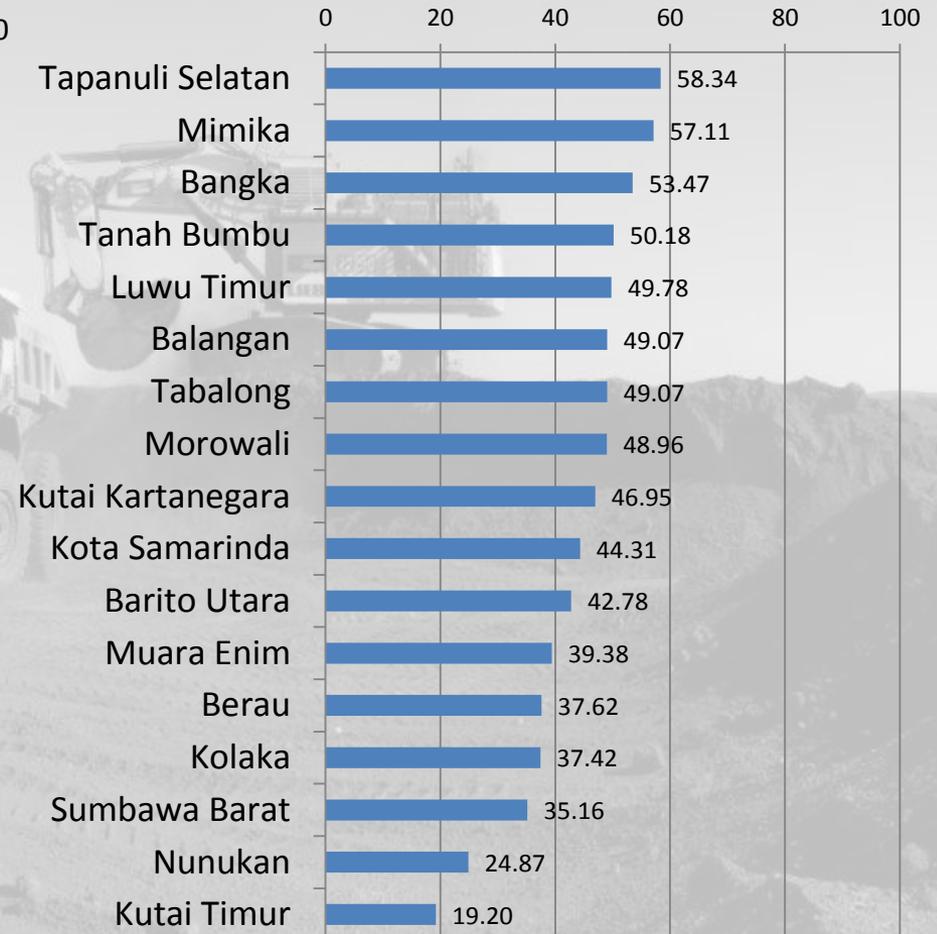


4. Ruang untuk Peningkatan Kabupaten

Tahun 2015

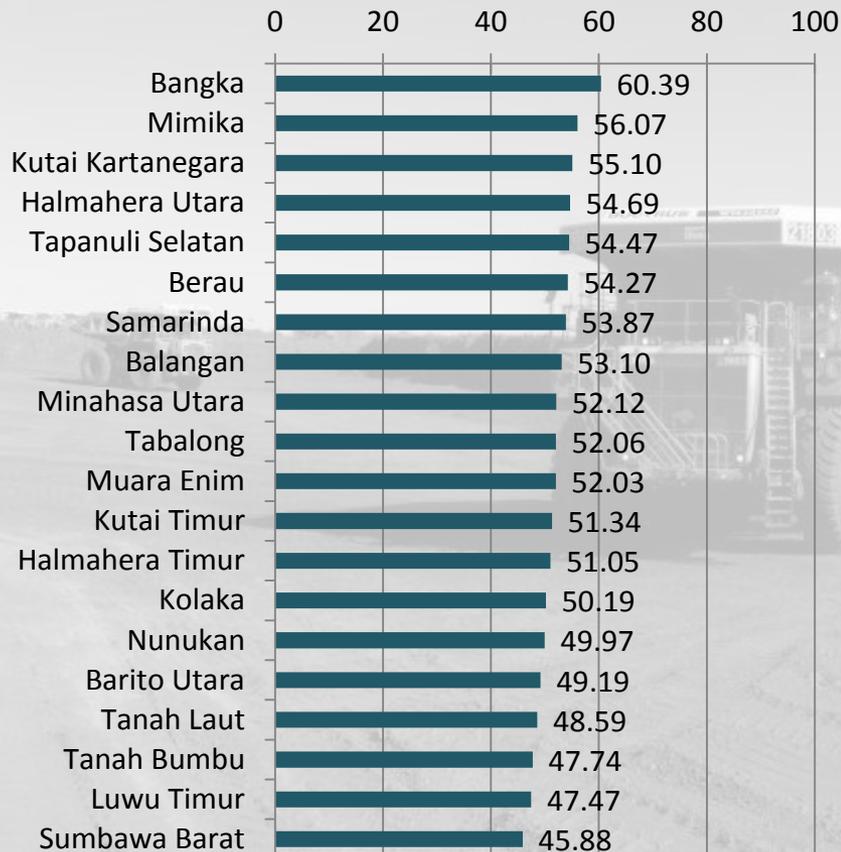


Tahun 2013-2014



5. Indeks Komposit Kabupaten

Tahun 2015



Tahun 2013-2014

